



pemerintah kabupaten jombang rencana strategis

dinas pengendalian penduduk dan
keluarga berencana pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

26



Jl. Presiden K.H. Abdurrahman Wahid No. 161 Jombang 61419

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Dinas PPKB dan P3A tiga tahun kedepan Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang telah selesai.

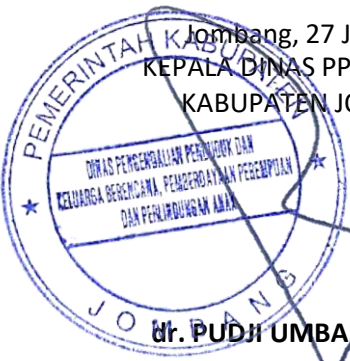
Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang untuk 3 (tiga) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Dalam rangka meningkatkan konsistensi dan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan tingkat OPD, maka disusun dokumen Renstra Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) ini memberikan pedoman bagi semua komponen unit kerja, mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana Dinas PPKB PPPA untuk melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja untuk menjamin pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas PPKB PPPA 2024-2026 yang merupakan perwujudan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 Kabupaten Jombang.

Akhirnya, keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas PPKB PPPA tergantung pada komitmen segenap pegawai Dinas PPKB PPPA untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang.

Jombang, 27 Juni 2023

Jombang, 27 Juni 2023
KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN JOMBANG



Dr. PUDJI UMBARAN, M. KP
Pembina Tk. I
NIP. 196804102002121006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	12
2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	43
2.4.1. Tantangan	43
2.4.2. Peluang	43
BAB III PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	45
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	45
3.2. Telaahan Renstra.....	53
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur	58
3.3.1. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur	58
3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian	60
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	64
3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	64
3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	73
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	73
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	78
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	78
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	105
BAB VIII PENUTUP	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan sektor yang sangat strategis dan perlu direncanakan secara komprehensif, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan dua sisi yang berbeda. Satu sisi jika pertumbuhan penduduk memiliki kualitas yang baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi sebaliknya jika pertumbuhan penduduk berkualitas rendah, disamping akan menyebabkan beban negara yang semakin besar, juga menyebabkan permasalahan lain seperti pengangguran, pernikahan perempuan usia dini, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, kriminalitas dan dampak negatif lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk akan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan di sektor lainnya.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka program harus dilaksanakan dengan cara menuangkannya dalam suatu dokumen perencanaan yang dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pelaksanaan RPD tersebut, dijabarkan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, disamping merupakan penjabaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, juga terdapat keterkaitan dengan RPJMN, Renstra BKKBN, dan RPJMD Propinsi Jawa Timur, Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 mengamanatkan daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024- 2026.

Sehubungan dikeluarkannya keputusan Menteri dalam Negeri nomor. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan daerah maka perlu dilakukan perubahan rencana strategis (RENSTRA) Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 yang merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan dibidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Agar Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jombang ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jombang dan stakeholder lainnya yang ada di Jombang. Berbagai alasan yang mendasari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Perundang-undangan.

Renstra OPD ini salah satunya disebabkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berubah dan terbitnya perundang-undangan yang baru, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Amanat Pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagai Amanat Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gerbangkertasusila sebagai Amanat Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai Amanat Pasal 53 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah sebagai Amanat Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja pembangunan daerah IKU dan target kinerja pembangunan daerah disebabkan oleh adanya asumsi makro ekonomi dan sosial serta bencana nasional covid-19 yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global, sehingga perekonomian Jawa Timur dan Jombang mengalami yang sangat signifikan serta adanya penambahan beberapa indikator sebagai penyesuaian dari beberapa kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yaitu :
 - (1). Diterapkannya SNA (System National Account) 2008 pada metodologi penghitungan PDRB yang menggunakan tahun dasar 2010 menyebabkan cakupan sektor/kategorinya semakin luas, dimana perkembangan sektor lapangan usaha menjadi 19 (sembilan belas) sektor dan menyebabkan menurunnya capaian angka pertumbuhan ekonomi, (2). Pada perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan Geometric Mean pada penghitungan komposit, angka melek huruf tidak digunakan lagi dan digantikan oleh angka harapan sekolah, (3). Indeks Reformasi Birokrasi dirubah menjadi Indeks Good Governance dimana Good Governance digunakan dalam manajemen organisasi pemerintahan sebagai suatu cara untuk membuktikan kualitas pembangunan di suatu wilayah sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi diukur dalam Indikator Sasaran Daerah, (4). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kualitas Pelayanan Publik yang merupakan komposit perhitungan dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP), (5). Jumlah Desa Mandiri dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), (6). Angka Kriminalitas diganti menjadi Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum karena Angka Kriminalitas lebih menjadi tanggung jawab dari Polres, (7). Pergeseran sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman dari Misi ke 2 (dua) dan (8). Penambahan indikator sasaran baru Indeks Resiko Bencana untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman. Penambahan indikator sasaran Jumlah Desa Mandiri bertujuan untuk mensinkronkan data informasi dasar bagi pembangunan desa, sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditambahkan jadi indikator sasaran karena komponen indikator variabelnya sangat besar untuk

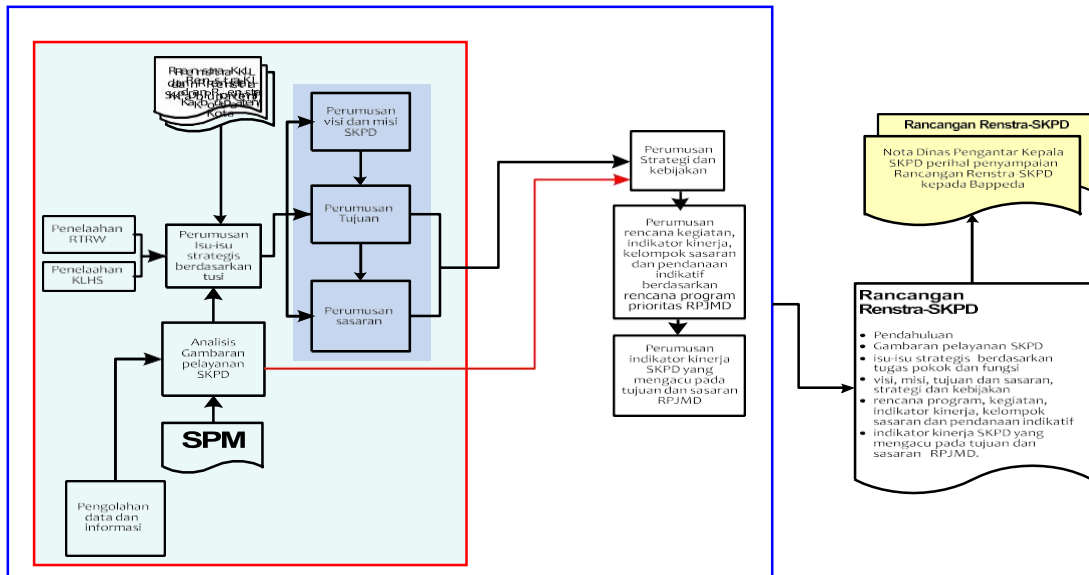
menggambarkan kualitas digitalisasi layanan di Kabupaten Jombang.

3. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah beserta Undang-Undang turunannya mengamanatkan bahwa pelaksanaan program-program kabupaten atau kota harus sinkron, mengarah dan bersinergi pada prioritas pembangunan provinsi dan program pembangunan nasional. Sehingga perlu dilakukan dan pengkajian ulang atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-~~2023~~, untuk dijadikan dasar pedoman dalam melaksanakan dan mengaplikasikan program-program dan kegiatan Kabupaten Jombang yang selanjutnya dengan melakukan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jombang dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Dengan penyelarasan program dan kegiatan diharapkan memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Jombang.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, digambarkan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Aliran Penyusunan Renstra DPPKB PPPA Kabupaten Jombang



Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 merupakan proses menentukan strategi, alokasi sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan 3 (tiga) tahun kedepan, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan kependudukan yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja), selama kurun waktu 3 tahun. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Menjaga keselarasan antara perencanaan jangka menengah Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Jombang tahun 2024-2026;
2. Sebagai panduan bagi seluruh jajaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan tahunan sehingga senantiasa selaras dengan perencanaan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

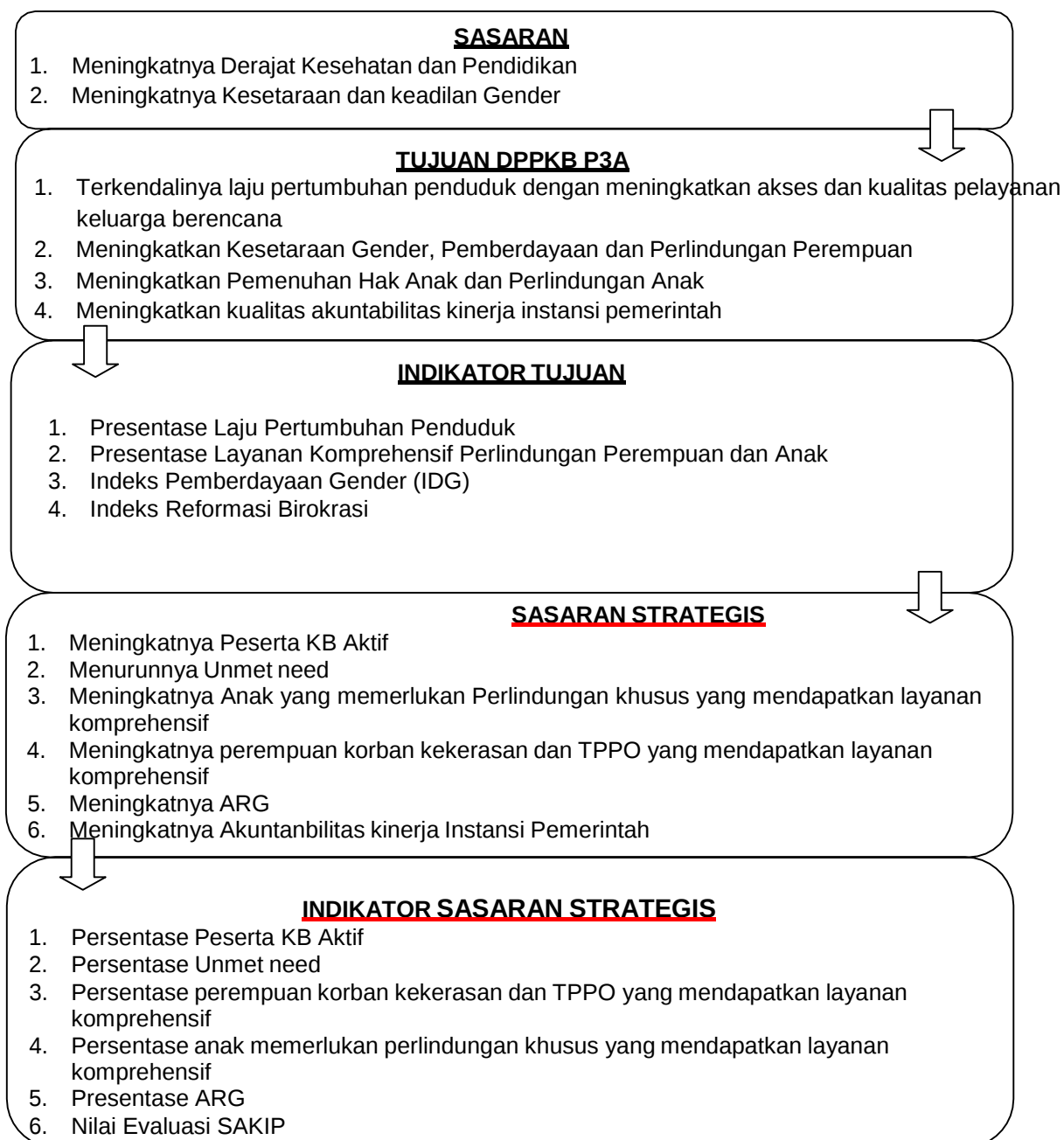
3. Sebagai salah satu media komunikasi dan informasi dengan seluruh pemanfaat layanan dan stakeholder Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan RPD Kabupaten Jombang, karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Jombang. Berikut ini akan digambarkan dalam bagan tentang keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan RPD Kabupaten Jombang. Berikut ini gambaran tentang keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan RPD Kabupaten Jombang;

Keterkaitan Renstra dengan RPD

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan RPD Kabupaten Jombang



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan rencana strategis Dinas PPKB PPPA Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 16. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 212/per/B1/2015 tentang Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang tahun 2009-2029
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur Tahun 2011-2031.
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023
 26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Jombang (dari Peraturan Bupati Jombang

- Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Jombang.
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
 28. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
 30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

- a. Memberikan arahan bagi seluruh *stakeholders* Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat;
- b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPD dengan Renstra OPD;
- c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) Tahun mendatang dalam urusan kependudukan dan kualitas penduduk dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Jombang

1.1.2 Tujuan

- 1.1 Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja pada masing-masing bidang atau seksi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2.1 Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan Tahunan

daerah dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang periode Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. LANDASAN HUKUM
- 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
- 2.2. SUMBER DAYA
- 2.3. KINERJA PELAYANAN
- 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
- 3.2. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR
- 3.3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
- 3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUANDAN SASARAN

- 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.1. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

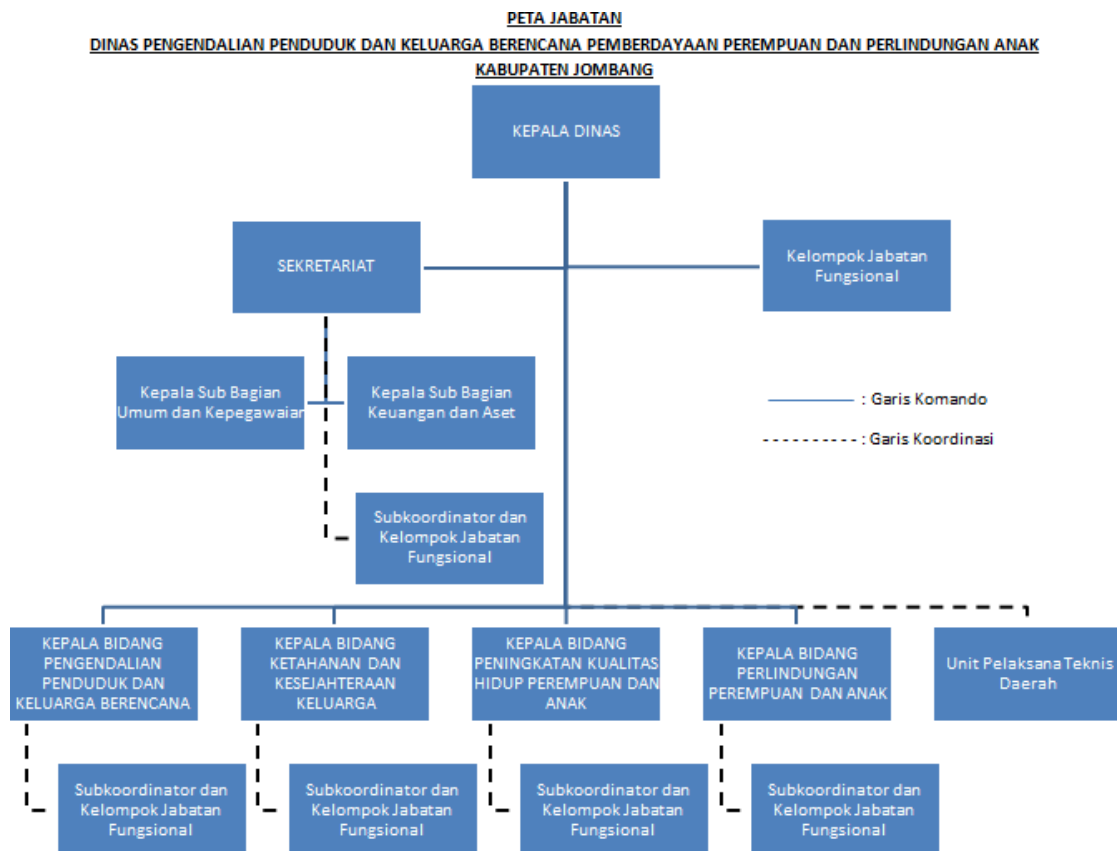
Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 5. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
-
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Adapun Struktur Organisasi DPengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Jombang dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Sumber data : Lampiran Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022

Segala urusan yang menjadi rangkaian pelaksanaan pemerintahan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas dan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga

- berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Pelaksanaan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d) Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e) Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f) Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g) Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, menyusun program evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta pedoman operasional pelaksanaan dan evaluasi kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi dan pengembangan pegawai, penyusunan rencana dan evaluasi program dan anggaran rumah tangga serta penatakelolaan keuangan;
- b. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. Pengelolaan administrasi Keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi Perlengkapan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Pengelolaan aset;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier pegawai ;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, perjalanan dinas dan perlengkapannya, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan serta pemeliharaan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan;
- g. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan melaksanakan tugas;
- h. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur;
- i. Menyusun Standart Pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas :

- k. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- l. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- m. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan anggaran;
- n. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- o. Melaksanakan penatausahaan, pengelolaan dan pelaporan aset;
- p. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan Pegawai; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Mempunyai Fungsi:

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, serta pelayanan dan jaminan Keluarga Berencana,

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana, serta pelayanan dan jaminan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh Keluarga berencana/Petugas Lapangan Keluarga berencana dan kader Keluarga Berencana, serta pelayanan dan jaminan keluarga berencana;
- c. Perumusan norma, prosedur, standar dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader keluarga

- berencana, serta pelayanan jaminan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, serta pelayanan jaminan Keluarga Berencana;
 - f. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan keluarga berencana, serta pelayanan jaminan Keluarga Berencana;
 - g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, serta pelayanan jaminan Keluarga Berencana;
 - h. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga Berencana, serta pelayanan jaminan Keluarga Berencana;
 - i. Pelaksaaan koordinasi lintas instansi di bidang advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan KaderKeluarga Berencana, serta pelayanan jaminan keluarga berencana;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

c) Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga,Mempunyai Fungsi:

Bidang keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga BerencanadanPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan informasi Keluarga, Pembinaan Kesertaan keluarga berencana, serta bina ketahanan dan

kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

- k. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang teknis di bidang pendataan dan informasi Keluarga, Pembinaan Kesertaan keluarga berencana, serta bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pelaksanaan norma, prosedur, standard kriteria di bidang teknis di bidang pendataan dan informasi Keluarga, Pembinaan Kesertaan keluarga berencana, serta bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di teknis di bidang pendataan dan informasi Keluarga;
- n. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di teknis di bidang pembinaan dan kesertaan keluarga Berencana;
- o. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di teknis di bidang Ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- p. Pemantauan dan evaluasi di bidang pendataan dan informasi keluarga, pembinaan kesertaan keluarga berencana, serta bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- q. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendataan dan informasi keluarga, pembinaan kesertaan keluarga berencana, serta bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- r. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai bidang tugasnya.

d) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak, Mempunyai Fungsi:

Bidang Peningkatan kualitas Hidup Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta peningkatan pemenuhan hak anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- t. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang kesertaan dan keadilan gender; peningkatan pemenuhan hak anak;
- u. Pelaksanaan norma, prosedur, standar dan kriteria di bidang kesertaan dan keadilan gender; peningkatan pemenuhan hak anak;
- v. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang kesetaraan dan keadilan gender;
- w. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan;
- x. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang peningkatan pemenuhan hak anak;
- y. Pemantauan dan evaluasi di bidang kesertaan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan pemenuhan hak anak;
- z. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesertaan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan serta peningkatan pemenuhan hak anak;
- aa. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai bidang tugasnya

e) Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten dalam bidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a) Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b) Pelaksanaan norma, prosedur, standar dan kriteria di bidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- e) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f) Pemantauan dan evaluasi dibidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang penguatan tenaga layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h) Pelaksanaaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f) Unit Pelaksana Teknis Daerah

- a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- b) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- c) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang

2.1.1 Kepegawaian / Aparatur Dinas Pengendalian, Penduduk Keluarga, Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jombang

Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia bukan hanya sebagai alat dalam produksi tetapi memiliki peran penting dalam kegiatan produksi suatu organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

sebagai salah satu bentuk organisasi pemerintahan, maka posisi strategis dan dominan tersebut memberikan tuntutan bagi setiap organisasi untuk memiliki sumber daya aparatur dalam rangka melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan, termasuk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Dalam rangka pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan dan mewujudkan administrasi pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sehingga sumber daya aparatur perlu untuk dikelola secara tepat dan terarah agar sesuai dengan yang dibutuhkan.

Komposisi sumber daya aparatur di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang terdiri dari 20 personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 19 Personil Non PNS, dapat dibagi berdasarkan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	Kepala Dinas	1

2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Unit Pelaksana Teknis	1
5	Kepala Sub Bagian	2
6	Pejabat Subkoordinator Fungsional Umum	4
7	Staf	7
8	Honorar	15
Jumlah		35

Sumber data: Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Oktober 2023

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Klasifikasi Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	II/d	1
2	III/a	1
3	III/b	3
4	III/d	5
5	IV/a	9
6	IV/c	1
7	Honorar	15
Jumlah		35

Sumber data : Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Oktober 2023

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Klasifikasi Pangkat

No	Pangkat	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	7
Jumlah		13

Sumber data : Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 1 Oktober 2023

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Klasifikasi Jenjang Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0
2	Magister (S2)	9
3	Sarjana (S1)	14
4	Diploma III	2
5	SMA/Sedrajat	9
6	SMP/Sedrajat	1
Jumlah		35

Sumber data : Data Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakper 1 Oktober 2023

2.1.2 Aset/Modal

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Jombang saat ini telah memiliki aset/modal sebagai sarana dan prasarana yang digunakan daam menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, dirangkum dalam tabel inventaris di bawah ini :

Tabel 2.6 Daftar Inventaris

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
I	Kendaraan Dinas Jabatan				
1	Kendaraan Dinas R4	7	6	-	1
2	Kendaraan Dinas R2	152	111	40	-
II	Perlengkapan Gedung Kantor				
1	Poma air	4	4	-	-
2	Almari Besi/Metal	5	2	-	3
3	Rak besi	11	2		9
4	Rak Kayu	19	15	-	4
5	Filling Besi/metal	10	3	5	2
6	Lemari kaca	2	2	-	-
7	Brangkas	2	1	-	1
8	Alat Penghancur Kertas	2	2	-	-
9	Papan Tulis	2	2	-	-
10	Copy Board/Elektrik White Board	1	1	-	-

11	Meja Kayu	21	21	-	-
12	Kursi Besi/Metal	21	21	-	-
13	Meja Rapat	20	20	-	-
14	Meja Tulis setengah biru	23	23	-	-
15	Kursi Rapat	160	160	-	-
16	Kursi Tamu	1	-	1	-
17	Kursi Putar	1	1	-	-
18	Kursi Biasa plastik	77	77	-	-

No.	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
19	Kursi Biasa	15	4	11	-
20	Kursi Kerja	28	9	19	-
21	Bangku Tunggu	2	2	-	-
22	Sofa	2	2	-	-
23	Lemari Es	1	1	-	-
24	Kaca Hias	1	1	-	-
25	Ac.	32	32	-	-
26	P.C. Unit	44	44	-	-
27	Lap Top	13	13	-	-
28	Note Book	33	33	-	-
29	Printer	76	76	-	-
30	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	-
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	-	-
32	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	-	-
33	Kursi Kerja Pejabat eselon IV	17	17	-	-
34	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	4	4	-	-
35	Camera+Attachment	2	2	-	-
36	Proyektor+Attachment	19	19	-	-
37	Peralatan Studio Visual	1	1	-	-
38	Sound System	2	2	-	-

39	Telephone (Pabx)	1	1	-	-
----	------------------	---	---	---	---

Sumber data : Buku Intra dan Extra BMD PPKB,PPPA Kabupaten Jombang.

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat dijelaskan melalui tabel 2.8 Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode tahun 2024-2026 dengan menggunakan indikator sebagai tolak ukur standart capaian yaitu indikator Standart Pelayanan

Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator kinerja lainnya.

Tabel 27. Pencapaian Kinerja Pelayanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Reproduksi Anak Kabupaten Abung

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPPA
			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7
Pertumbuhan Akseptor KB Aktif		0,50%	0,50%	0,60%	0,70%	0,50%
Jumlah Akseptor KB Baru		100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program sesuai Kearifan Budaya Lokal		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Bidang Penyuluhan KKBPK		16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan
Persentase Kader IMP yang Aktif		100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi
Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		418 orang	418 orang	418 orang	418 orang	418 orang
Persentase Akseptor KB Aktif		67%	67%	72%	77%	67%
Jumlah orang yang mengikuti Kesempatan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		3.749 Orang	3.749 Orang	3.749 Orang	3.749 Orang	3.749 Orang
Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Jaringannya		72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan
Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB						
Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Keganakasan Penggunaan MKJP		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang

			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
--	--	--	---	--	--	--

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan 2022		Tahun1 2024	Tahun2 2025	Tahun3 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPPA
			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi di Faskes termasuk jaringan dan jejarin		72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan
Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK		100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelol Program KKBPK di Kampung KB		37 kampung KB	37 kampung KB	37 kampung KB	37 kampung KB	37 kampung KB
Persentase data kecamatan yang dgdata tepat waktu	89%	52%	52%	52%	80%	92%
Jumlah kecamatan dengan data dan informasi keluarga terupdat	43%	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	21 Kecamatan	57%
Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedia	12 Kecamatan	3 Dokumen	3 Dokumen	3Dokumen	3 Dokumen	12 Kecamatan
Jumlah Personil pengolah data yang difasilitasi		100 Orang	100 Orang	100 Orang	110 Orang	100 Orang
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian dan Pelayanan KB		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2Dokumen	2 Dokumen
Persentase kelompok BKB, BKR, B-KRL,,PPPIKPKS dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif						
Jumlah Kelompok -PRIK yang aktif	30 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	40 Kelompok	50 Kelompok	15 Kelompok
Jumlah Unit sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejaht Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK-B, dan PKPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	36 Paket	30 Paket	30 Paket	30 Paket	20 Paket	15 Paket
Jumlah kader pengelola dan pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PP-PRKdSa,nPIK Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3045 Kader	3045 Kader	3045 Kader	3045 Kader	3045 Kader	3045 Kader

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			Tahun1 2024	Tahun2 2025	Tahun3 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPPA

			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua He Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	560 Orang	650 Orang	650 Orang	650 Orang	750 Orang	800 Orang
Jumlah kelompok BKB, BKR, PBP, PKPLK, S dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang Aktif						
Jumlah Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PP-PRKdSan, PIK Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Organisasi	101 Organisasi	101 Organisasi	101 Organisasi	126 Organisasi	91 Organisasi
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5 Laporan	2 Laporan
Persentase ARG		31%	31%	31%	37%	28%
Persentase OPD dan Desa yang melaksanakan kelembagaan PUG		72,20%	72,20%	72,20%	100%	56,40%
Jumlah OPD dan Desa yang di fasilitasi Perumusan Kebijakan PUG		61 OPD 51 Desa	61 OPD 51 Desa	61 OPD 51 Desa	61 OPD 71 Desa	61 OPD 41 Desa
Jumlah desa yang di fasilitasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksana PUG termasuk PPRG		52 Desa	52 Desa	52 Desa	50 Desa	146 Desa
Jumlah Kecamatan dan Desa yang Apamaterndayapatkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG		3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	2 Kecamatan	3 Kecamatan
Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			Tahun 1 2024	Tahun 2 2025	Tahun 3 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPPA
			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah Lembaga Perempuan yang mendapatkan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		53 Lembaga	53 Lembaga	53 Lembaga	59 Lembaga	50 Lembaga
Jumlah anggota Sekop dan Pyaenkgamendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan		100 Orang	100 Orang	100 Orang	200 Orang	50 Orang
Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan P yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah SDM lembaga kemasyarakatan yang meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang	2500 Orang
Persentase Kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilay komprehensif	94%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	67%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi tentang kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di daerah kabupaten/kota	11 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	30 Lembaga	12 Lembaga
Jumlah institusi Non OPD yang difasilitasi tentang Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Institusi	72 Institusi	72 Institusi	72 Institusi	74 Institusi	72 Institusi
Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilay standart	94%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah perempuan korban kekerasan Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	100%	25 Perempuan	25 Perempuan	25 Perempuan	35 Perempuan	100%

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Perencanaan 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPA
			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100%	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100%
Persentase SDM lembaga Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan Pembinaan	33%	100%	100%	100%	100%	40%
Jumlah laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyedia Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Orang
Jumlah SDM lembaga penyedia layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100Orang	55 Orang	55 Orang	55 Orang	65 Orang	164 Orang
Persentase Kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	86%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perangkat daerah yang mendapat advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak	59%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi Kebijakan Pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	144 Institusi	72 Orang	72 Orang	72 Orang	80 Orang	243 Institusi
Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terlayani	89%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapat tindak lanjut pengaduan kewenangan kabupaten/kota	100%	25 Anak	25 Anak	25 Anak	40 Anak	100%
Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100%	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100%

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
			Tahun 1 2024	Tahun 2 2025	Tahun 3 2026	Kondisi Kinerja pada akhir period Renstra DPPKBPPPA
			target	Target	target	target
1	2	3	4	5	6	7

Jumlah dokumen hasil penguatan Jejaring antarPLenmybeadgiaa Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewena Kabupaten/Kota	100%	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100%
Persentase Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang aktif	59%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah dokumen hasil penguatan Jejaring antar Lembaga Peny Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewena Kabupaten/Kota	180 Lembaga	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	306 Lembaga
Jumlah dokumen hasil Koordinasiindkaronnisasi peningkatan kapasi sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerluka perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	25 Orang	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	22 Dokumen	25 Orang
Persentase Desa sudah menginisiasi Layak Anak		60%	60%	60%	60%	
Persentase lembaga pemerintah,non pemerintah dan dunia usa melaksanakan pemenuhan hak anak		24%	24%	24%	24%	
Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dun yang mendapat advokasi kebijakan dan PendaPmeprminegnaunhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan D Kewenangan Kabupaten/Kota		219 Organisasi	219 Organisasi	219 Organisasi	219 Organisasi	
Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaa Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	
jumlah tenaga Pendamping KHA yang terlatih		88 orang	88 orang	88 orang	88 orang	
jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas **Pengdeundduaklidaann** Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	3.699.750	4.069.725	4.476.698	4.924.367	-	0%	20%	100%
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat	-	3.699.750	4.069.725	4.476.698	4.924.367	-	0%	20%	100%

		2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	3.699.750	4.069.725	4.476.698	4.924.367	-	0%	20%	100%
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			347.977.800	737.418.550	811.160.405	892.276.446	981.504.090	342.338.450	98%	20%	100%
		2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	73.112.350	107.863.000	118.649.300	130.514.230	143.565.653	70.346.650	96%	20%	100%
		2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	45.499.300	60.308.400	66.339.240	72.973.164	80.270.480	44.933.600	99%	20%	100%
		2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	36.725.600	40.398.160	44.437.976	48.881.774	-	0%	20%	100%
		2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	27.613.050	10.829.000	11.911.900	13.103.090	14.413.399	25.413.050	92%	20%	100%
		2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	94.569.150	83.509.000	91.859.900	101.045.890	111.150.479	93.677.400	99%	20%	100%
		2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	94.569.150	83.509.000	91.859.900	101.045.890	111.150.479	93.677.400	99%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisasi
		2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.296.300	546.046.550	600.651.205	660.716.326	726.787.958	178.314.400	99%	20%	100%
		2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	180.296.300	546.046.550	600.651.205	660.716.326	726.787.958	178.314.400	99%	20%	100%

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			440.055.600	333.486.450	366.835.095	403.518.605	443.870.465	260.228.678	59%	20%	100%
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		28.868.600	102.316.000	112.547.600	123.802.360	136.182.596	28.435.600	99%	20%	100%
		2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	28.868.600	102.316.000	112.547.600	123.802.360	136.182.596	28.435.600	99%	20%	100%
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		397.451.500	46.283.400	50.911.740	56.002.914	61.603.205	218.057.578	55%	20%	100%
		2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	118.900.000	18.899.900	20.789.890	22.868.879	25.155.767	118.279.000	99%	20%	100%
		2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	278.551.500	27.383.500	30.121.850	33.134.035	36.447.438	99.778.578	36%	20%	100%
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Layanan Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		13.735.500	12.798.000	14.077.800	15.485.580	17.034.138	13.735.500	100%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot	13.735.500	12.798.000	14.077.800	15.485.580	17.034.138	13.735.500	100%	20%	100%
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			171.326.900	172.089.050	189.297.955	208.227.751	229.050.526	164.686.900	96%	20%	100%
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		152.097.500	144.416.250	158.857.875	174.743.663	192.218.029	145.457.500	96%	20%	100%
		2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak p Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	22.044.300	46.899.250	51.589.175	56.748.093	62.422.902	16.294.300	74%	20%	100%
		2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkroni Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	130.053.200	97.517.000	107.268.700	117.995.570	129.795.127	129.163.200	99%	20%	100%
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		19.229.400	27.672.800	30.440.080	33.484.088	36.832.497	19.229.400	100%	20%	100%
		2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak bagi Lembaga Penyedia Layanan Penin Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.229.400	27.672.800	30.440.080	33.484.088	36.832.497	19.229.400	100%	20%	100%
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			364.894.050	129.001.000	141.901.100	156.091.210	171.700.331	319.986.000	88%	20%	100%
	2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		154.847.200	38.973.500	42.870.850	47.157.935	51.873.729	125.381.200	81%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	41.897.200	38.973.500	42.870.850	47.157.935	51.873.729	41.381.200	99%	20%	100%
		2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	112.950.000		-	-	-	84.000.000	74%	20%	100%
		2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.521.900	55.243.000	60.767.300	66.844.030	73.528.433	86.403.000	90%	20%	100%
		2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.789.000	36.299.000	39.928.900	43.921.790	48.313.969	75.993.000	99%	20%	100%
		2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	19.732.900	18.944.000	20.838.400	22.922.240	25.214.464	10.410.000	53%	20%	100%
		2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Layanan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.524.950	34.784.500	38.262.950	42.089.245	46.298.170	108.201.800	95%	20%	100%
		2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.806.000		-	-	-	73.606.000	96%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.08.07.2.03.0K3koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Pen Layanan Anak yang Memerlukan Perlind Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.718.950	34.784.500	38.262.950	42.089.245	46.298.170	34.595.800	94%	20%	100%
2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.285.822.44	5.809.889.30	6.390.878.233	7.029.966.057	7.732.962.662	5.433.409.00	86%	20%	100%
	2.14.01.2.01 Perencanaan, PenganggarEavna,Iduansi Kinerja Perangkat Daerah		17.360.000	16.240.000	17.864.000	19.650.400	21.615.440	17.360.000	100%	20%	100%
		2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.920.000	5.740.000	6.314.000	6.945.400	7.639.940	5.920.000	100%	20%	100%
		2.14.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyus Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Re Kinerja SKPD	11.440.000	10.500.000	11.550.000	12.705.000	13.975.500	11.440.000	100%	20%	100%
	2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat D		4.736.761.14	4.551.434.80	5.006.578.283	5.507.236.112	6.057.959.723	3.974.407.90	84%	20%	100%
		2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.736.761.14	4.551.434.80	5.006.578.283	5.507.236.112	6.057.959.723	3.974.407.90	84%	20%	100%
	2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daer		146.073.000	348.160.500	382.976.550	421.274.205	463.401.626	136.379.060	93%	20%	100%
		2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan K	6.030.700	2.058.200	2.264.020	2.490.422	2.739.464	6.030.500	100%	20%	100%
		2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan d Perlengkapan Kantor	48.829.000	53.828.300	59.211.130	65.132.243	71.645.467	48.690.000	100%	20%	100%
		2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logi Kantor	7.250.000	204.134.000	224.547.400	247.002.140	271.702.354	2.950.000	41%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cet danPenggandaan	14.195.300	7.995.000	8.794.500	9.673.950	10.641.345	14.059.300	99%	20%	100%
		2.14.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Baca dan Peraturan Perund-uandgangan	3.720.000	3.720.000	4.092.000	4.501.200	4.951.320	3.120.000	84%	20%	100%
		2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	66.048.000	76.425.000	84.067.500	92.474.250	101.721.675	61.529.260	93%	20%	100%
		2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Pe Urusan Pemerintah Daerah	19.692.000	-	-	-	-	9.377.000	48%	20%	100%
		2.14.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Ka atau Bangunan Lainnya			-	-	-		0%	0%	100%
		2.08.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana GeduKnagntor atau Bangunan Lainnya	19.692.000	-	-	-	-	9.377.000	48%	20%	100%
		2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusa Pemerintahan Daerah	653.010.000	631.076.000	694.183.600	763.601.960	839.962.156	603.117.132	92%	20%	100%
		2.14.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.632.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	1.630.000	100%	20%	100%
		2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komu Sumber Daya Air dan Listrik	116.280.000	94.080.000	103.488.000	113.836.800	125.220.480	82.310.460	71%	20%	100%
		2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelaya Umum Kantor	535.098.000	534.996.000	588.495.600	647.345.160	712.079.676	519.176.672	97%	20%	100%
		2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusPaenmerintahan Daerah	704.226.295	262.978.000	289.275.800	318.203.380	350.023.718	684.212.909	97%	20%	100%
		2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja Perizinan Kendaraan DOnasrasional atau Lapangan	255.176.295	121.576.000	133.733.600	147.106.960	161.817.656	243.016.089	95%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	78.552.000	86.407.200	95.047.920	104.552.712	348.281.820	100%	20%	100%
		2.14.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	99.050.000	62.850.000	69.135.000	76.048.500	83.653.350	92.915.000	94%	20%	100%
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			246.336.400	496.355.200	545.990.720	600.589.792	660.648.771	239.854.600	97%	20%	100%
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		246.336.400	496.355.200	545.990.720	600.589.792	660.648.771	239.854.600	97%	20%	100%
		2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		64.200.000	70.620.000	77.682.000	85.450.200		0%	20%	100%
		2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	119.136.400	79.355.200	87.290.720	96.019.792	105.621.771	117.272.600	98%	20%	100%
		2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		256.800.000	282.480.000	310.728.000	341.800.800		0%	20%	100%
		2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.200.000	96.000.000	105.600.000	116.160.000	127.776.000	122.582.000	96%	20%	100%
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.917.658.780	6.247.791.600	6.872.570.760	7.559.827.836	8.315.810.620	5.993.726.220	87%	20%	100%
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.123.326.800	1.108.395.800	1.219.235.380	1.341.158.918	1.475.274.810	1.038.518.540	92%	20%	100%
		2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKB kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	120.000.000	132.000.000	145.200.000	159.720.000	4.375.000	100%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi d Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	28.711.800	15.662.200	17.228.420	18.951.262	20.846.388	28.711.800	100%	20%	100%
		2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Progra KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	155.640.000	194.933.600	214.426.960	235.869.656	259.456.622	155.601.000	100%	20%	100%
		2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Ra Koordinasi Kecamatan (Rakorcem), Rap Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	327.600.000	273.000.000	300.300.000	330.330.000	363.363.000	327.600.000	100%	20%	100%
		2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	567.000.000	424.800.000	467.280.000	514.008.000	565.408.800	488.530.744	86%	20%	100%
		2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	80.000.000	88.000.000	96.800.000	106.480.000	33.700.000	84%	20%	100%
		2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.108.720.00	1.259.474.50	1.385.421.950	1.523.964.145	1.676.360.560	2.108.720.00	100%	20%	100%
		2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Pro KKBPK dLiini Lapangan oleh PKB/PLKB	26.720.000	622.800.000	685.080.000	753.588.000	828.946.800	26.720.000	100%	20%	100%
		2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Inst Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.082.000.00	636.674.500	700.341.950	770.376.145	847.413.760	2.082.000.00	100%	20%	100%
		2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pela Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.047.361.98	3.297.421.30	3.627.163.430	3.989.879.773	4.388.867.750	2.216.007.68	73%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
		2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistrib Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaring	29.250.000	56.700.000	62.370.000	68.607.000	75.467.700	21.969.300	75%	20%	100%
		2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk Panjang (MKJP)	1.299.998.00	1.504.653.30	1.655.118.630	1.820.630.493	2.002.693.542	683.113.300	53%	20%	100%
		2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagala Penggunaan MKJP	5.000.000	5.000.000	5.500.000	6.050.000	6.655.000	2.000.000	40%	20%	100%
		2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.690.313.98	1.700.168.00	1.870.184.800	2.057.203.280	2.262.923.608	1.500.725.08	89%	20%	100%
		2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Term Jaringan dan Jejaringnya	22.800.000	30.900.000	33.990.000	37.389.000	41.127.900	8.200.000	36%	20%	100%
		2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan P Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan Kesertaan-KBBer	638.250.000	582.500.000	640.750.000	704.825.000	775.307.500	630.480.000	99%	20%	100%
		2.14.03.2.04.02 Integrasi Pembangunan Sektor di Kampung KB		9.000.000	9.900.000	10.890.000	11.979.000		0%	20%	100%
		2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Penge Program KKBPK di Kampung KB	638.250.000	573.500.000	630.850.000	693.935.000	763.328.500	630.480.000	99%	20%	100%
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKAT KELUARGA SEJAHTERA (KS)	6.036.497.62	7.357.078.85	8.092.786.735	8.902.065.409	9.792.271.949	5.444.492.22	90%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahu Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisas
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga	Kesejahteraan Keluarga	5.923.570.30	6.964.314.00	7.660.745.400	8.426.819.940	9.269.501.934	5.331.666.30	90%	20%	100%
	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Keld Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BPKPLP, KS, P-I R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK			360.000.000	396.000.000	435.600.000	479.160.000	-	0%	20%	100%
	2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Oper bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKL, PPPKS, P-I R dan Pemberdayaa Ekonomi Keluarga/UPPKS)		5.851.040.00	6.394.500.00	7.033.950.000	7.737.345.000	8.511.079.500	5.259.470.00	90%	20%	100%
	2.14.04.2.01.0P6enyediaan Biaya Operas bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BK PPPKS, P-I R dan Pemberdayaan Ekond Keluarga/UPPKS)			144.000.000	158.400.000	174.240.000	191.664.000	-	0%	20%	100%
	2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusi serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		72.530.300	65.814.000	72.395.400	79.634.940	87.598.434	72.196.300	100%	20%	100%
	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Per Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Per Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		112.927.320	392.764.850	432.041.335	475.245.469	522.770.015	112.825.920	100%	20%	100%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke	Rata-rata Pertumbuhan	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2022	Anggaran	Realisasi
		2.14.04.2.02.03 Pelaksanaan Peningkat Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKR, BKL, PPPKS, PKI dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	112.927.320	392.764.850	432.041.335	475.245.469	522.770.015	112.825.920	100%	20%	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan;
- b) Belum efektifnya Kelembagaan pengarusutamaan gender dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- c) Rendahnya kemampuan teknis sumber daya aparatur yang disebabkan oleh mutasi aparatur terlatih;
- d) Kurangnya sinkronisasi peraturan daerah tentang retribusi pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan pelayanan KB pada masyarakat;
- e) Belum ditetapkannya Permasalahan kependudukan menjadi permasalahan prioritas di Kabupaten Jombang.

2.4.2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- b. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- c. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- d. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Adanya kerjasama (MoU) dengan tempat pelayanan KB;
- f. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan.

Berdasarkan uraian tantangan dan peluang di atas, maka diperlukan suatu usaha dan strategi yang tepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang

sesuai dengan pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar tantangan yang lebih besar tersebut dapat teratasi sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dapat menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih baik dari periode sebelumnya.

BAB III
PERMASLAHAN DAN ISU STRAGETIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
 1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengikuti program MOP;
 2. Belum adanya tenaga terampil (medis) yang melayani MOP;
 3. Kurangnya sinkronisasi regulasi pelayanan KB MKJP.
- b. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**
 1. Tingginya angka pernikahan usia dini;
 2. Rendahnya partisipasi keluarga terhadap kegiatan Tribina (BKB,BKR,BKL) dan UPPKS.
- c. Permasalahan dibidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak** adalah:
 1. Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program pemberdayaan perempuan;
 2. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi-organisasi profesi lainnya;
 3. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
 4. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi perempuan dalam pemberdayaan perempuan;
 5. Masih rendahnya tingkat kerjasama dunia usaha, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan peran media dalam peningkatan pemberdayaan perempuan;
 6. Belum semua Perangkat Daerah mempunyai data terpilah gender;
 7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus;

8. Masih kurangnya jumlah sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak;
 9. Belum adanya pondok pesantren, Puskesmas menjadi Pondok Pesantren, Puskesmas Ramah Anak;
 10. Belum semua desa membentuk Forum Anak Desa;
 11. Belum seluruh tenaga layanan yang menangani anak mendapatkan pelatihan tentang KHA (Konvensi Hak Anak);
 12. Belum adanya keterwakilan Forum Anak dalam forum Musyawarah Desa maupun Kecamatan.
- d. Permasalahan pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:**
1. Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM.
 2. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
 3. Masih tingginya ego sektor dari Perangkat Daerah terkait, terutama instansi vertikal.
 4. Sulitnya membangun komitmen dengan jejaring (LSM) terkait pelaksanaan indikator SPM;
 5. Belum tersedianya payung hukum berupa Peraturan Daerah dalam perlindungan perempuan dan anak;
 6. Kurangnya lembaga layanan dan penanganan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 7. Kurangnya SDM konselor dan pendamping kasus/korban tindak kekerasan yang dibutuhkan pada saat proses pendampingan kasus;
 8. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, pondok pesantren dan media masa terhadap layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 9. Kecenderungan peningkatan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

Hanya sebagian titik lokasi KIE yang terpasang	Terbatasnya kemampuan menentukan titik lokasi KIE	Jumlah baliho yang terpasang	Meningkatkan kualitas pendu
Belum sampai informasi ke seluruh masyarakat	Belum semua masyarakat menjadi peserta KB	Laporan C-PLKB12	Meningkatkan kualitas pendu
Kurangnya pemahaman kader dalam pendataan	- Sumberdaya Manusia PPKBD dan Sub PPK belum merata kemampuannya - masih Kurangnya Pemahaman kader tentang management data - Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi kader pendata	- Laporan Pengendalian lapangan (Dalap) - Rata-rata SDM Kader tidak cukup memahami untuk management data - Informasi tentang management data tidak sampai langsung kepada kader	- Meningkatkan kualitas kader - Meningkatkan sarana dan prasarana pendataan dan penyampaian sistem management data dari konvensional ke komputerisasi langsung kepada kader
Kurangnya ketrampilan Kader KB dan pemahaman dalam menyampaikan KIE Program KB	Seringnya pergantian Kader KB seiring dengan pergantian Kepala Desa dan Perangkat Desa	Sosialisasi Program K	Meningkatkan SDM Kader K
Tidak Semua Faskes melaksanakan MOU	Tidak semua faskes mengajukan permohonan alokasi atau mengajukan klaim	1. Data Peserta KB A dan baru 2. Data faskes pelayanan KB yang terregistrasi (aplikasi SIGA)	Semua Faskes Pelayanan KB berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan KB
	Data Registrasi faskes yang melakukan pelayanan KB tidak update	Data Faskes Pelayanan Kesehatan yang terregistrasi	Data Faskes Pelayanan KB terupdate
Masih adanya calon peserta KB baru yang belum terdaftar	Kurangnya KIE bagi calon peserta KB baru yang diakibatkan berkurangnya tenaga penyuluh KB	Laporan C-PLKB12	Penambahan Tenaga Penyulu KB di Lapangan
Pemulihan untuk Komplikasi Berat KB membutuhkan biaya yang cukup besar	Kasus dan Besaran Biaya tidak Dapat diprediksi.	1. Data Peserta KB A dan baru 2. Laporan kasus Komplikasi Berat dan Kegagalan KB	Tidak ada kasus komplikasi berat dan kegagalan KB

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Menentukan Tenaga Kesehatan dan Tempat terkait pelaksanaan Pelayanan KB Bergerak khususnya untuk pelayanan KB Metode Operasi	Terkendala Tempat dan Waktu kegiatan yang bersamaan dengan pelayanan reguler	1. Data Peserta KB A dan baru 2. Data daftar tenaga kesehatan dan Faskes	Pelayanan KB Bergerak dapat menarik sejumlah besar Akse Baru untuk Metode MKJP
Kurangnya pemahaman kader dalam pendataan			
Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga			
Tidak semua remaja yang ada di desa, kecamatan dan sekolah mengetahui dan memahami tentang TRIAD KRR dan PUP	Kurangnya informasi tentang TRIAD KRR dan PUP	pendataan usia perkawinan	Masih adanya Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun

Tidak semua kelompok memiliki sarana kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya fasilitasi AP (Alat Permainan Edukatif) di kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) / Laporan kegiatan pengadaan sarana kegiatan	Masih adanya kelompok kegiatan yang belum memiliki APE (Alat Permainan Edukatif)
Tidak semua calon pengantin ibu hamil dan keluarga memahami informasi terkait kesehatan reproduksi serta penanganan dan pengasuhan 1000 HPK	Kurangnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi serta penanganan dan pengasuhan 1000 HPK pada calon pengantin, hamil dan keluarga	Pendataan Pengasuh 1000 HPK	Masih adanya ibu hamil yang mengalami stunting
Tidak semua Balai penyuluhan KB mendapat advokasi dan promosi IPK	Pengalokasian kegiatan yang bertahap	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) / Laporan kegiatan di Balai Penyuluhan KB	Masih adanya balai penyuluhan KB yang belum mendapat advokasi dan promosi IPK
Belum semua masyarakat berpartisipasi dalam pembinaan serta pengembangan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Kurangnya informasi terkait pentingnya Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) / Laporan kegiatan Kampung KB di Kecamatan	
Belum semua keluarga yang mempunyai Balita, Remaja dan Lansia memahami kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kurangnya informasi kepada keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia tentang kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan bulanan dari Kecamatan	Masih adanya keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia yang belum berpartisipasi dalam kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Belum semua keluarga melakukan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kurangnya promosi dan sosialisasi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) / Laporan kegiatan	Masih adanya keluarga yang belum memahami serta melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Belum ada modul yang standart untuk PPRG Desa	Materi untuk pembuatan PPRG Desa belum ada petunjuk dari pusat	Bisa studi tiru ke Kabupaten yang sudah membentuk desa responsive gender	PPRG Desa bisa menjadi inovasi dalam kegiatan di PKHPA
Belum ada pelatihan tutor untuk pelaksanaan Bimtek PPRG di Desa	Belum adanya anggaran TOT dari pusat	Menunggu TOT dari DP3AK Provinsi Jawa Timur	Pelatih yang kurang kompeten
Belum ada petunjuk yang baku dalam pembuatan PPRG Desa	Menunggu petunjuk yang baku pembuatan dokumen PPRG desa dari pusat (DP3AK Provinsi Jatim)	Menunggu TOT dari DP3AK Provinsi Jawa Timur	Pembuatan dokumen PPRG Desa merupakan inovasi Kabupaten Jombang
Kurangnya narasumber lokal pada kegiatan pemantapan focal point PUG	Belum ada TOT narasumber di daerah terkait PUG	Inventarisasi data narasumber lokal untuk masing-masing kompetensi pada bidang kegiatan	narasumber lokal kurang kompeten pada bidang kegiatan PUG

Kurangnya pemahaman peserta dalam menemukan isu gender di desa	Terbatasnya SDM peserta	Mencatat jadwal kegiatan advokasi pemantapan PUE desa	Pentingnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam gender
Tidak adanya narasumber ahli/terampil pada kegiatan Pembentukan Desa Responsive Gender, sehingga menggunakan tutor dari OPD terkait.	Rincian peruntukan anggaran dana DID sudah ditetapkan tidak ada anggaran untuk narasumber	Dana DID tidak memperbolehkan penggunaan biaya narasumber pada kegiatan pembentukan desa responsive gender	Dana DID sudah ditetapkan rincian penganggarnya dari pusat
Belum semua desa menindaklanjuti kebijakan tentang desa responsive gender	Belum adanya Perdes tentang Desa Responsive gender	Menunggu TOT dari DP3AK Provinsi Jawa Timur	Pembentukan Desa Responsive Gender merupakan percontohan dari Pusat
Belum ada bahan ajar yang standart untuk sekoper (Modul)	Materi dasar untuk sekoper belum ada dari pusat	Bisa study tiru Sekop di Gresik	Sekopekan menjadi inovasi kegiatan PKHPA
Belum ada pelatihan tutor untuk guru atau pelatih Sekoper	Belum ada penganggaran TOT dari pusat	Menunggu TOT dari DP3AK Provinsi Jatim	Guru/pelatih kurang kompeten
Belum ada kurikulum yang baku untuk sekoper	Menunggu kurikulum dari pusat (DP3AK Provinsi Jatim)	Menunggu TOT dari DP3AK Provinsi Jatim	Sekoper masih uji coba/percontohan
Pelatihan keterampilan untuk kapasitas ekonomi dan hukum, Pekka dan P3EL sebagian belum bisa ditindaklanjuti/diterapkan anggotakelompok	Monitoring evaluasi belum maksimal	Data basis anggota kelompok Pekka dan P3EL yang valid	Pelatihan keterampilan kurang berdampak pada meningkatkan aktivitas ekonomi anggota kelompok
Kurangnya partisipasi dari desa dalam pengembangan penyediaan layanan pemberdayaan perempuan	kurang sosialisasi dan koordinasi dengan perangkat desa/pimpinan desa	Adanya keputusan /S dari pimpinan desa untuk dukungan kegiatan pemberdayaan perempuan	Kepala desa kurang perhatian pada kelompok kegiatan pemberdayaan perempuan

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Kurangnya narasumber lokal (saat era pandemi sulit menghadirkan narasumber luar) pada kegiatan pemantapan Puspa dan Sekoper	Saat era pandemi sulit menghadirkan narasumber luar (belum ada TOT narasumber daerah)	Inventarisasi data narasumber lokal untuk masing-masing kompetensi bidang kegiatan	Narasumber lokal kurang kompeten pada bidang kegiatan PKHP
Peserta pemantapan P3E belum bisa maksimal menerapkan pengetahuan pada kelompok di Desa	Terbatasnya SDM peserta pemantapan	Mencatat jadwal kegiatan pertemuan rutin pada kelompok kegiatan	Peserta tidak memahami hasil workshop
Tidak adanya narasumber ahli/terampil pada kegiatan pelatihan Pekka dan Seko yang dilaksanakan dengan dana DID, sehingga menggunakan Tutor tema sebaya yang belum mahir	Rincian peruntukan anggaran dana DID sudah ditetapkan tidak ada anggaran untuk narasumber	Dana DID tidak memperbolehkan penggunaan biaya narasumber pada kegiatan pelatihan ekonomi	Dana DID sudah ditetapkan rincian penganggarnya dari pusat

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kurangnya Pemahaman Peserta dalam tindak lanjut Sosialisasi TPPO di desa	Penyampaian Narasumber kurang diterima oleh peserta	hasil evaluasi kegiatan sosialisasi TPPO	Masih rendahnya pemahaman peserta tentang sosialisasi TPP
Belum semua desa menindaklanjuti kebijakan tentang Desa Bebas KDR	Peserta belum memahami tentang Desa Bebas KDRT	hasil evaluasi dan monitoring kegiatan sosialisasi Desa Bebas KDRT	Hanya desa tertentu yang mengikuti sosialisasi
petugas layanan yang kurang sesuai SOP	kurangnya pemahaman peserta tentang layanan sesuai SOP	hasil evaluasi dan monitoring petugas layanan	Masih rendahnya pemahaman petugas layanan sesuai SOP
kepedulian masyarakat dan perangkat desa dalam penanganan kasus yang masih kurang, yang menyebabkan kasus masih tinggi	SDM masyarakat yang masih rendah	hasil evaluasi dan monitoring perangkat desa	Masih rendahnya masyarakat dan perangkat desa yang peduli dalam penanganan kasus
Belum semua petugas layanan menanggapi dengan manajemen kasus	belum semua petugas mendapat pelatihan mediator manajemen kasus	hasil evaluasi dan monitoring tenaga mediator manajemen kasus	Tidak semua petugas layanan melaksanakan pelayanan manajemen kasus
belum semua petugas desa mendapat pelatihan tenaga layanan perlindungan perempuan	Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan pelatihan tenaga layanan perlindungan perempuan	hasil evaluasi dan monitoring	Perlu meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan tenaga layanan perlindungan perempuan
Kurangnya Pemahaman Peserta dalam tindak lanjut Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan	Penyampaian Narasumber kurang diterima oleh peserta	hasil evaluasi dan monitoring	Masih rendahnya pemahaman Peserta dalam tindak lanjut Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan
Belum semua desa menindaklanjuti kebijakan tentang peduli anak	Hanya desa tertentu yang ditunjuk mendapat sosialisasi tentang peduli anak	hasil evaluasi dan monitoring	Belum semua Desa mendapatkan Sosialisasi Tenaga PATBM (pemberdayaan Anak terpadu berbasis Masyarakat)

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
petugas layanan yang kurang sesuai SOP	petugas layanan tidak melaksanakan layanan sesuai SOP	evaluasi dan monitoring	Petugas Layanan Belum memahami tentang SOP
kepedulian masyarakat dan perangkat desa dalam penanganan kasus yang masih kurang, yang menyebabkan kasus masih tinggi	Masyarakat belum seluruhnya mendapat sosialisasi penanganan kasus	evaluasi dan monitoring	Kurangnya sosialisasi penanganan kasus
Belum semua petugas layanan menanggapi dengan PATBM	belum semua Petugas mendapat pelatihan PATBM	evaluasi dan monitoring	kurang maksimalnya penanganan kasus tindak kekerasan
belum semua petugas desa mendapat pelatihan PATBM	Belum bisa melaksanakan penanganan kasus kekerasan sesuai PATBM secara merata	evaluasi dan monitoring	

Masih kurangnya pemahaman OPD dan Desa tentang KLA	Belum semua OPD dan Desa mendapatkan advokasi tentang indikator kabupaten dan Desa Layak Anak	evaluasi dan koordinasi Kabupaten Layak Anak	Nasih rendahnya pengetahuan OPD dan Desa tentang indikator kabupaten Layak Anak
Belum Semua Desa Mempunyai Kebijakan Tentang KLA	perbub KLA belum diakomodir dalam perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Desa	hasil evaluasi indikator Desa Layak Anak	belum adanya perda tentang pembentukan Desa Layak Anak di lingkup pemerintah Desa
kurangnya sarana prasarana PHA	kurangnya advokasi kepada lembaga PHA tentang pentingnya sarana prasarana PHA	evaluasi dan koordinasi Kabupaten Layak Anak	kurangnya kepedulian lembaga PHA terhadap tersedianya sarana dan prasarana PHA
kurangnya partisipasi dalam forum pemenuhan hak anak serta partisipasi pemerintah yang kurang optimal	belum semua desa mempunyai forum kanak-kanak desa	hasil evaluasi indikator Desa Layak Anak	masih banyaknya desa yang belum membentuk forum anak desa
masyarakat baru mengenai TPPO dan Desa Bebas KDRT	kurangnya sumber pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan Desa Bebas KDRT	data wilayah yang mendapat sosialisasi tentang TPPO dan Desa Bebas KDRT	perlu mengadakan sosialisasi TPPO dan Desa Bebas KDRT lebih luas
belum keseluruhan kasus yang dilaporkan ke dinas PPKB, PPPA	ketidaktahuan korban untuk melaporkan ke Dinas PPKB PPPA karena belum mendapat sosialisasi	data wilayah yang mendapat sosialisasi	Data kasus belum menggambarkan kasus kekerasan kabupaten Jember
masih ditemukan kasus kekerasan Perempuan berulang pada klien yang sama	SDM korban masih rendah terkait pemahaman penanganan tindak kekerasan	Data kasus kekerasan T2-P2A	Penanganan kasus belum efektif

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Masih ditemukan tenaga layanan yang tidak memahami penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	belum semua tenaga layanan yang terlatih memahami penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan	Data evaluasi dan monitoring	kurangnya pemahaman tenaga layanan terkait penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
Kurangnya Pemahaman Peserta Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Penyampaian Narasumber kurang diterima oleh peserta	Data evaluasi dan monitoring	Masih rendahnya pemahaman peserta tentang Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
Masih ditemukan tenaga layanan yang tidak memahami sistem PATBM dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak	Tenaga layanan belum mendapat pelatihan PATBM	evaluasi dan monitoring	perlu adanya Pelatihan PATBM Menyeluruh
masih kurangnya pengetahuan Tenaga Layanan Anak Terhadap (Konvensi Hak Anak)	belum semua tenaga layanan anak terlatih KHA	evaluasi dan koordinasi Kabupaten Layak Anak	masih rendahnya jumlah tenaga pendamping anak
Sekretariat			
Kurang Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kurang Terfasilitasinya Pelayanan Kantor	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor	Kurangnya sarana dan prasarana
Terlambatnya pencairan di Pada awal Tahun	Sistem Aplikasi Pada Keuangan	Kurang Tepat Waktu dalam Sistem Terbar	Penyerapan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Rencana Anggaran Kas
Adanya Refocusing Anggaran Daerah	Kurang Terpeliharanya Peralatan	Kurang Menyeluruhnya pemeliharaan Peralatan	Banyak peralatan yang belum pelihara
	Kurang Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kurang Menyeluruhnya pemeliharaan Kendaraan Dinas	Banyak Kendaraan Dinas yang belum di pelihara secara Maksimal
	Kurang Terpeliharanya Gedung Kantor	Kurang Menyeluruhnya pemeliharaan Gedung Kantor	Masih ada gedung kantor yang belum di pelihara secara Maksimal
Kurangnya anggaran belanja	Tidak Sesuai Rencana Anggaran Kas Terhadap Belanja	Anggaran Tidak terserap Sesuai Rencana Anggaran Kas	Banyak Anggaran yang Tidak Terserap
Kurangnya kualitas pemenuhan kelengkapan dokumen perencanaan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan	dokumen Renstra dan Renja	Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas
Kurang lengkapnya data pendukung dalam penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	Terhambatnya penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	Dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja
Terlambatnya pencairan gaji dan tunjangan ASN	Sistem baru yang diberlakukan belum berjalan lancar	Demi kelancaran penggajian sementara masih menggunakan sistem baru secara parsial	Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN lancar dan tepat waktu

Identifikasi Permasalahan	Akar Masalah	Data/Informasi Terkait	Isu Strategis
Tidak tepat waktu penyelesaian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan Tahunan SKPD	Ketrampilan/ kemampuan petugas karena terjadi pergantian selain itu juga data yang masih harus ditunggu dari bagian akuntansi/OPD koordinasi Laporan Keuangan	Demikian terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan Tahunan, dengan mempelajari pedoman/ petunjuk yang ada	Terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester dan Tahunan yang akurat dan tepat waktu

3.2. Telaahan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan elemen penting dari sistem perencanaan pembangunan. Rencana Strategis Kabupaten Jombang disusun dalam bentuk perencanaan kerja jangka menengah (lima tahunan) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Jombang. Dengan demikian, secara substantif dokumen Renstra harus selaras dengan RPD Kabupaten Jombang 2024-2026.

Peningkatan kualitas hidup manusia yang berdaya saing tidak lepas dari nilai-nilai sosial dan beragama yang dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keterlibatan langsung untuk ikut mewujudkan misi tersebut. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pengendalian penduduk, kualitas penduduk, pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak, secara terpadu dan sinergi bersama Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup penduduk di Kabupaten Jombang.

Dengan tersusunnya RPD Kabupaten Jombang, maka OPD perlu menyingkronkan antara Tujuan RPD dengan Tujuan PD. Adapun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki keselarasan antara lain:

Tabel Tujuan PD

Tujuan RPD	Indikator RPD	Sasaran RPD	Indikator RPD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatny Kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningka nya derajat pendidika n dan kesehatar	Indeks Kesehata n	Terkendalin ya laju pertumbuha n penduduk dengan meningkatkan akses dankualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase La Pertumbuhan Penduduk	Meningkatny Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	79,31 %	71,58%	72,00%	72,50%	75%	75,25%	75,50%	75,75%
						Menurunnya Unmet need	Persentase Unmet need	15%	14%	13%	12%	11%	10,7%	10,5%	10,4%
		Meningka nya kesetaraa n dan keadilan gender	Indeks Pembang unan Gender (IPG)	Terlaksana ya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Komprehensif Perlindungan Perempuan da Anak	Meningkatny perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatka layanan komprehens	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatka Layanan Komprehens	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						Meningkatny Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatka layanan komprehensi	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatka layanan komprehensi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Meningkatn yaKeadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangu an	Indeks Pemberdayaar Gender (IDG)	Meningkatny ARG	Persentase ARG	73,7 6%	73,76 %	73,76 %	72,24 %	74%	74,25 %	74,50 %	74,75 %
				Meningkatn ya kualitas akuntabilita kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatny Akuntanbilita kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluas SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A

Beberapa hal yang menjadi langkah-langkah utama yang perlu dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mendukung RPD Kabupaten Jombang, yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
4. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
5. Program Perlindungan Perempuan
6. Program Perlindungan Khusus Anak
7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
8. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
• Terbatasnya tempo pelayanan MOP • Tingginya angka pernikahan usia dini (usia < 20 tahun) • Rendahnya partisipasi keluarga terhadap kegiatan Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	• Ketersediaan tenaga medis terampil pelayanan KB MOP • Rendahnya biaya pelayanan KB dari APBN (MOP) • Undang-undang Perkawinan Nomor 1/74 tentang Usia Minimal Perkawinan 1 tahun. • Kurangnya tenaga PKB • Adanya rangkapan fungsi	• Adanya pelatihan dan magang pelayanan KB MO • Adanya Kapitalisasi biaya MOP bagi peserta BPJS • Ketidaksiapan remaja menghadapi teknologi informasi • Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, remaja, dan lanjut usia • Keterbatasan Sumberdaya Manusia relawan Desa

Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
	Kader PKB dengan sekto lainnya	
• Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan. • Masih lemahnya Komunikasi Informa Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program pemberdayaan perempuan. • Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi profesi lainnya • Belum efektifnya kelembagaan PUG pemberdayaan perempuan. • Masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah terkait pelaksanaan dan pencapaian indikator SPM • Masih tingginya ego sektoral Perangkat Daerah terkait, terutama instansi vertikal. • Sulitnya membangun komitmen dengan jejaring (LS terkait pelaksanaannya indikator SPM. • belum semua kasus	• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
kekerasan terhadap anak dilaporkan sehingga banyak kasus kekerasan belum dapat tertang • Belum optimalnya fasilitasi pembentuk Forum Anak (Forum Anak baru terbentuk Kabupaten dan beberapa Desa) • Belum semua puskesmas ramah anak • belum tersedia payu hukum sekolah ramah anak • masih ditemukannya anak yang menjadi korban kekerasan • belum optimalnya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum • belum optimalnya pemenuhan hak ana berkebutuhan khusu		

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Timur

3.3.1. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3A dan KB Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP);
2. Menurunnya angka kelahiran TFR per WUS (15-49 tahun);
3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR);
4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need);
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun);

6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan WUS (15-49 tahun);
7. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
8. Meningkatkan penanganan kasus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas P3A dan KB Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas P3A dan KB Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)	• -	• -	• -
2	Menurunnya angka kelahiran TFR di bawah WUS (1-549 tahun)	• Belum maksimalnya tempat layanan KB	• Rendahnya biaya kapitasi dari APBN	• Rendahnya rasio kapitasi dengan jumlah peserta KB
3	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	• Kurangnya tenaga konseling tenaga medis terampil	• Kurangnya pelatihan bagi tenaga konseling dan tenaga medis terampil	• Rendahnya tingkat pendidikan
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	• Masih tingginya Prosentase Baru yang unmet need	• Banyaknya PUS yang tidak ikut ber-KB	• Ingin anak segera
5	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun)	• Tingginya pernikahan usia dini	• Rendahnya biaya pelayanan KB dari APBN (MOP)	• Rendahnya biaya pelayanan KB dari APBN (MOP)
6	Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan WUS (1-549 tahun)	• Rendahnya pemahaman alat reproduksi remaja • Rendahnya pemahaman terhadap alat/obat kontrasepsi	• Keterbatasan tenaga terampil (KIE)	• Belum adanya rekrutmen PKB

7	Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan ant perempuan dan laki, yang diukur Ind	• Rendahnya kualitas hidup da peran perempuan • Banyaknya peraturan perund undangan yang bias gender • Lemahnya kelembagaan dan	• Sarana dan prasarana yang masih kurang • Kualitas dan kuantitas SDM ma	• Adanya komitme pemerintah (Gubernur) untuk mendukung pelaksanaan
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas P3A dan KB Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pembangunan Gen (IPG), dan Ind Pemberdayaan Gen (IDG)	• jaringan pengarusutamaan gender • Terbatasnya akses sumber d dan peran serta perempuan dalam pembangaunn	• kurang memadai • Terbatasnya anggaran	• program • Terjalinnnya jejari antara dinas/inst si, Perguruan Tinggi, LSM/ Organisasi • Terjalinnnya jejari dengan Kab/Kot
8	Meningkatnya penanganan kas kekerasan dan trafik terhadap perempu dan anak.	• Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan an		

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian

Tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. **Menurunnya Angka kelahiran Total (TFR)**
2. Meningkatnya prevelensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
6. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.
7. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembagamasyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian PP dan PA tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas PP dan PA Kabupaten Jombang Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PP dan PA beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menen	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor
----	----------------------	------------------------	----------------

	RenstraK/L		Penghambat	Pendorong
1	MenurunkanAngka kelahiranTotal (TFR)	Belum maksimalnya tempat layanan KB	Rendahnya biaya pelayanan KB	Rendahnya rasio kapitasi dari APBN kapitasi dengan jumlah peserta KB
2	Meningkatkanprevalensi kontrasepsi (CPR) modernmedis terampil	Kurangnya tenaga konseling dan tenaga medis terampil	Kurangnya pelatihan bagi tenaga konseling dan tenaga medis terampil	Rendahnya tingkat keberhasilan
3	Menurunkankebutuhan b-KRB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Masih tingginya Prosentase KB Baku yang ingin anak segera tidak ikut be-rKB	Banyaknya PUS yang tidak ikut be-rKB	Ingin anak segera
4	Meningkatkanpeserta KB yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Rendahnya rasio tenaga konseling - Diberhentikannya program KB dari Pemerintah Pusat bagi calon peserta KB yang baru melahirkan	Tidak adanya rekrutmen PKB	Adanya anggapan program KB sudah berhasil
1	a. Meningkatnya capaian in-pembangunan gender	Masih lemahnya Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), Kesetaraan Gender dalam program pemberdayaan perempuan.	Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan
	b. Meningkatnya capaian in-pemberdayaan gender	- Rendahnya jumlah perempuan menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, politik, dan organisasi profesi lainnya - Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki. - Belum efektifnya kelembagaan dan pemberdayaan perempuan	belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus	Pemberdayaan Perempuan Adanya kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TP	Masih belum memadainya jumlah kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan.	kekerasan terhadap perempuan dan anak Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TP			
3	a. Meningkatnya implementasi	Belum optimalnya fasilitasi pembentukan Forum Anak (Forum Anak baru terbentuk di Kabupaten dan beberapa Desa)	pelaksanaan tugas	
	kabupaten/kota layak anak Indonesia.			
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan kepada anak	Belum semua kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan sehingga banyak kasus kekerasan belum tertangani		
	c. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan kepada anak	- Belum tersedianya lembaga pengasuhan alternatif ramah anak - Masih ditemukannya anak yang		

m e n j a d		• I korban kekerasan • Belum optimalnya penanganan yang berhadapan dengan huku • Belum optimalnya pemenuhan anak berkebutuhan khusus
4	Meningkatnya partisipasi d sinergitas lembaga profesi dunia usaha, media, dan	Masih kurangnya partisipasi le masyarakat dan dunia usaha terhadap perempuan dan Anak

No	Sasaran Jangka Menengah RenstraK/L	Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang kota mengacu pada telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009-2029 memberikan dasar yang kuat bagi penataan ruang kota, maka salah satu langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai operasionalisasi rencana kota tersebut diperlukan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota. Sistem Perkotaan di Kabupaten Jombang yang akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Selain itu untuk menjaga konsistensi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah disusun diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dengan komitmen tinggi. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. aruh terhadap pola dan

fungsi ruang.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai permasalahan diatas, dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah yang dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di sisa perodesasi dua tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang ada beberapa hal yang dapat dijadikan acuan antara lain:

a. Gambaran Pelayanan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang kependudukan dan pemberdayaan, perlindungan wajib untuk memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan telah memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang memperoleh kepuasan atas pelayanan

yang telah diberikan. Didalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

b. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang, tentunya tidak lepas dari Kementerian sehingga Renstra Kementerian menjadi acuan bagi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang. Adapun arah kebijakan strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan laju pertumbuhan penduduk;
- 2) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3) Meningkatkan Sosialisasi dan Fasilitasi terkait dengan Pengarusutamaan gender dan Hak Anak;
- 4) Meningkatkan partisipatif aktif Organisasi Perempuan di Kabupaten jombang dalam pembangunan;
- 5) Mengoptimalkan Sosialisasi, Fasilitasi dan Penanganan Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak (KDRT, Pelecehan Seksual, Trafficking dan kasus perempuan).
- 6) Implikasi rencana tata ruang wilayah bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Sejauh ini, belum terdapat aturan yang jelas tentang RT/RW yang mengatur masalah kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak. Secara tidak langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak terlibat, namun pada kondisi lapangan hal tersebut sangat berpengaruh pada pembentukan dan penetapan kondisi kawasan.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu bentuk kebijakan yang mengatur suatu wilayah dengan tujuan untuk menjaga lingkungannya agar tidak terjadi kerusakan serta adanya pemerataan perkembangan wilayah. Secara tidak langsung peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dalam menjalankan pelayanan terkait masalah kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan masih dalam ranah kajian lingkungan hidup strategis.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*) serta tantangan (*Threats*). Kekuatan atau *strengths* adalah potensi/kelebihan intern yang dimiliki Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut ::

- a. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang.
- b. Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran.
- c. Adanya Sarana dan Prasarana kantor.
- d. Adanya sumber daya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kelemahan atau *weaknes* adalah kekurangan yang ada dalam OPD yang bersifat menghambat kinerja, meliputi :

- a. %HOXP PDNVLPDOQ\D WHPSDW OD\DQDQ
.%
- b. Kurangnya tenaga konseling dan tenaga medis terampil;
- c. Masih tingginya angka pernikahan usia dini;

d. Masih rendahnya keikutsertaan keluarga dalam BKB, BKR dan BKL;

Peluang atau *opportunity* adalah fakta *eksternal* yang bisa mendukung kinerja, meliputi :

- a. Adanya 306 tenaga PPKBD dan 1738 tenaga Sub PPKBD dari unsur masyarakat;
- b. Adanya 491 kelompok BKB, 203 kelompok BKR, dan 318 kelompok BKL;
- c. Adanya 129 kelompok UPPKS dan 56 kelompok PIK R;
- d. Adanya kerjasama dengan 68 Fasilitas Kesehatan, dan 68 tenaga medis;
- e. Adanya kerjasama dengan BPJS dalam hal pembiayaan KB bagi peserta BPJS;
- f. Adanya kerjasama dengan RSUD dan Rumah Sakit Mojowarno;
- g. Adanya 22 lembaga organisasi perempuan;
- h. Adanya Forum Anak Jombang tingkat Kabupaten Jombang;
- i. Adanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A)
- j. Adanya Panti Sosial;
- k. Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Jombang.

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- a. Diperbolehkannya menikah usia 16 tahun oleh Undang-undang Perkawinan;
- b. Rendahnya kesadaran PUS mengikuti MOP;
- c. Rendahnya kesadaran keluarga mengikuti BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
- d. Maraknya kasus KDRT;
- e. Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini;
- f. Maraknya kasus pencabulan/pelecehan seksual terhadap anak.

Dari analisa SWOT diperoleh isu-LVX VWUDWHJLhV's
ilaDLWX Pengendalian penduduk di Kabupaten Jombang belum
diimbangi dengan NXDOLWDV SHQGXXN'

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan RPD, target pada periode 2014-2026 yang belum dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya untuk ditindaklanjuti pada periode 2024-2026.

Belum tercapainya target pada periode 2014-2026 diakibatkan oleh
Renstra DPPKBPPA 2024-2026 | 68

petugas layanan tidak melaksanakan layanan sesuai SOP
Masyarakat belum seluruhnya mendapat sosialisasi penanganan kasus
belum semua Rukun Tetangga mendapat pelatihan PATBM
Belum bisa melaksanakan penanganan kasus kekerasan sesuai PATBM secara merata
Belum semua OPD Dan Desa mendapatkan advokasi tentang indikator kabupaten dan Desa Layak
perbub KLA belum di akomodir dalam perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Desa
kurangnya advokasi kepada lembaga PHA tentang pentingnya sarana prasarana PHA
belum semua desa mempunyai forum anak desa
kurangnya sumber pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan Desa Bebas KDRT
ketidaktahuakn korban untuk melapor ke Dinas PPKB PPPA karena belum mendapat sosialisasi
SDM korban masih rendah terkait pemahaman penanganan tindak kekerasan
belum semua tenaga layanan yang terlatih memahami penanganan kasus tindak kekerasan terhadap
Penyampaian Narasumber kurang diterima oleh peserta
Tenaga layanan belum mendapat pelatihan PATBM
belum semua tenaga layanan anak terlatih KHA
Sekretariat
Kurang Terfasilitasinya Pelayanan Kantor
Sistem Aplikasi Pada Keuangan
Kurang Terpeliharanya Peralatan
Kurang Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Kurang Terpeliharanya Gedung Kantor
Tidak Sesuai Rencana Anggaran Kas Terhadap Belanja
Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan
Terhambatnya penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan realisas
Sistem baru yang diberlakukan belum berjalan lancar
Ketrampilan/ kemampuan petugas karena keterbatasan selain itu juga data yang masih harus ditunggu akuntansi/OPD koordinator Laporan Keuangan

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang diperlukan strategi :

Isu Strategis
Bidang Pengendalian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan kualitas penduduk
Meningkatkan kualitas penduduk
- Meningkatkan kualitas kader KB
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendataan dan penyampaian sistem management data dari komputerisasi langsung kepada kader
Meningkatkan SDM Kader KB
Semua Faskes Pelayanan KB berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan KB
Data Faskes Pelayanan KB terupdate
Penambahan Tenaga Penyuluh KB di Lapangan
Tidak ada kasus komplikasi berat dan kegagalan KB
Pelayanan KB Bergesit menarik sejumlah besar Akseptor Baru untuk Metode MKJP
Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
Masih adanya Perkawinan pertama wanita usia < 20 tahun
Masih adanya kelompok kegiatan yang belum memiliki APE (Alat Pelanggaran)
Masih adanya baaduta yang mengalami stunting
Masih adanya balai penyuluhan KB yang belum mendapatkan advokasi dan promosi IPK

Masih adanya keluarga yang memiliki balita, remaja dan lansia belum berpartisipasi dalam kegiatan Kesejahteraan Keluarga
Masih adanya keluarga yang belum memahami serta melaksanakan Pemberdayaan Ekonomi Kelua
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
PPRG Desa bisa menjadi inovasi dalam kegiatan di PKHPA
Pelatih yang kurang kompeten
Pembuatan dokumen PPRG Desa merupakan inovasi Kabupaten Jombang
narasumber lokal kurang kompeten pada bidang kegiatan PUG
Pentingnya pemahaman kesadaran masyarakat dalam isu gender
Dana DID sudah ditetapkan rincian penganggarnya dari pusat
Pembentukan Desa Responsive Gender merupakan percontohan dari Pusat
Sekoper akan menjadi inovasi kegiatan PKHPA
Guru/pelatih kurang kompeten
Sekoper masih uji coba/percontohan
Pelatihan keterampilan kurang berdampak pada meningkatnya aktifitas kelompok pok
Kepala desa kurang perhatian pada kelompok kegiatan pemberdayaan perempuan
Narasumber lokal kurang kompeten pada bidang kegiatan PKHP
Peserta tidak memahami hasil workshop
Dana DID sudah ditetapkan rincian penganggarnya dari pusat
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya pemahaman peserta tentang sosialisasi TPPO
Hanya desa tertentu yang mengikuti sosialisasi
Masih rendahnya pemahaman petugas layanan sesuai SOP
Masih rendahnya masyarakat dan pemerintah peduli dan penanganan kasus
Tidak semua petugas layanan melaksanakan pelayanan manajemen kasus

Isu Strategis
Perlu meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan pelatihan tenaga layanan perlindungan perempu
Masih rendahnya pemahaman Peserta dalam tindak lanjut pencegahan tindak kekerasan
Belum semua Desa mendapatkan Sosialisasi Tentang PATBM (pemberdayaan Anak terpadu berba
Petugas Layanan Belum memahami tentang SOP
Kurangnya sosialisasi penanganan kasus
kurang maksimalnya penanganan kasus tindak kekerasan
Nasih rendahnya pengetahuan OPD dan Desa tentang indikator kabupaten Layal Anak
belum adanya perdes tentang pembentukan Desa Layak Anak di lingkup pemerintah Desa
kurangnya kepedulian lembaga PHA terhadap tersedianya prasarana PHA
masih banyaknya desa yang belum membentuk forum anak desa
perlu mengadakan sosialisasi TPPO dan Desa Bebas KDRT lebih luas
Data kasus belum menggambarkan kasus kekerasan kabupaten Jombang
Penanganan kasus belum efektif
kurangnya pemahaman tenaga layanan terkait penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perem
Masih rendahnya pemahaman peserta tentang Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak
perlu adanya Pelatihan PATBM Menyeluruh
masih rendahnya jumlah tepeng damping anak
Sekretariat
Kurangnya sarana dan prasarana
Penyerapan Anggaran Tidak Sesuai Dengan Rencana Anggaran Kas
Banyak peralatan yang belum di pelihara
Banyak Kendaraan Dinas yang belum di pelihara secara Maksimal
Masih ada gedung kaynatonrg belum di pelihara secara Maksimal
Banyanya Anggaran yang Tidak Terserap
Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas
Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

Terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN lancar dan tepat waktu
Terselesaikannya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran dan Tahunan yang akurat dan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Jombang. Sejalan dengan Visi Kabupaten Jombang, di mana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka pada bab ini tidak memuat Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

Tujuan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jombang 2024-2026 dijabarkan menjadi empat (4) tujuan, yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik. Pembangunan birokrasi pemerintahan dengan tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik merupakan prasyarat dasar atau syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan lain pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten Jombang. Cakupan substansi dalam kerangka

tujuan pembangunan memuat pembangunan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas pengembangan information, communication, and Technology.

- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing Tujuan ini sangat strategis sebagai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Jombang sesuai dengan konstruksi cita-cita politik yakni Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing. SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang harus dibentuk untuk sekaligus mampu mengambil tempat pada konteks persaingan regional, nasional maupun internasional.
- 3) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya Masyarakat Jombang memiliki karakter dasar yang kuat sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya. Nilai-nilai keagamaan dan nilai luhur budaya dapat dikapitalisasi secara positif dan konstruktif sebagai modal sosial dalam proses pembangunan daerah. Pada sisi lain, nilai-nilai dan aktivitas keagamaan dan kebudayaan bersifat dinamis dan harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Pembangunan daerah di Kabupaten Jombang juga dihadapkan pada kondisi masih adanya kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Meskipun secara statistik terus mengalami penurunan dan angka kemiskinan berada di bawah nasional dan provinsi, namun demikian penurunan tersebut sangat lambat dan tetap membutuhkan langkah intervensi untuk mengakselerasi dan menginkluskasikan penurunan dari tahun ke tahun.
- 4) Meningkatkan daya saing, pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sector unggulan lainnya Tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan yang integratif. Pada akhirnya untuk mewujudkan Jombang yang Berdaya Saing, hampir tidak mungkin meninggalkan tindakan intervensi dan pendekatan ekonomi. Daya saing yang dimaksud juga harus direpresentasikan melalui struktur dan basis perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan Misi tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakmenjabarkan dengan menyusun Rencana Strategis tahun 2024-2026 yang memuat tujuan dan sasaran dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis sehingga sekaligus dapat melaksanakan dan mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan;
2. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakserta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakmenetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Peserta KB Aktif;
2. Menurunnya Unmet need;
3. Meningkatnya ARG;
4. Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif;
5. Meningkatnya Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif;
6. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah di atas beserta indikator kinerjanya dapat dilihat dalam bentuk tabel 4.1a dan 4.1b sebagai berikut :

Tabel 4.1 a
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 900 Tahun 2023					
Tujuan PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
		2024	2025	2026	
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana	Persentase Peserta KB Aktif	75,25%	75,50%	75,75%	
	Persentase Unmet need	10,7%	10,5%	10,4%	
Terlaksananya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	
	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%	
Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase ARG	74,25%	74,50%	74,75%	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	A	

Tabel 4.1 b
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 900 Tahun 2023						
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	TARGET KINERJA, TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Meningkatnya Peserta KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	75,25%	75,50%	75,75%

pelayanan keluarga berencana		Menurunnya Unmet need	Persentase Unmet need	10,7%	10,5%	10,4%
Terlaksananya Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Layanan Komprehensif Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	100%
		Meningkatnya Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	100%
Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya ARG	Persentase AR	74,25%	74,50%	74,75%
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan

1. Peraturan Bupati Jombang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang;
2. Adanya Dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah didukung anggaran;
3. Adanya Sarana dan Prasarana kantor;
4. Adanya sumber daya manusia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Kelemahan

1. %HOXP PDNVLPDOQ\ D WHPSDW OD\ DQDQ .%
2. Kurangnya tenaga konseling dan tenaga medis terampil;
3. Masih tingginya angka pernikahan usia dini;
4. Masih rendahnya keikutsertaan keluarga dalam BKB, BKR dan BKL;
5. Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM.

c. Peluang

1. Adanya 306 PPKBD dan 1738 Sub PPKBD dari unsur masyarakat;
2. Adanya 491 BKB, 203 BKR, dan 318 BKL;
3. Adanya 129 kelompok UPPKS dan 56 kelompok PIK R/M;
4. Adanya kerjasama dengan 68 Fasilitas Kesehatan, dan 68 tenaga medis;
5. Adanya kerjasama dengan BPJS dalam hal pembiayaan KB bagi peserta BPJS;
6. Adanya kerjasama dengan RSUD dan Rumah Sakit Mojowarno;
7. Adanya 22 lembaga organisasi perempuan;
8. Adanya Forum Anak Jombang tingkat Kabupaten Jombang;
9. Adanya Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LP2A)
10. Adanya Panti Sosial
11. Adanya PKK pada tiap Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten Jombang

d. Tantangan

1. Diperbolehkannya menikah usia 16 tahun oleh UU Perkawinan;
 2. Rendahnya kesadaran PUS mengikuti MOP;
 3. Rendahnya kesadaran keluarga mengikuti BKB, BKR, BKL dan UPPKS;
 4. Maraknya kasus KDRT;
 5. Masih banyaknya kasus pernikahan pada usia dini;
 6. Maraknya kasus pencabulan/pelecehan seksual terhadap anak
- Berdasarkan identifikasi faktor-faktor SWOT di atas, selanjutnya

dirumuskan formulasi strategi sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
--------	---------	----------	-----------

Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Jombang	Meningkatnya derajat Kesehatan	Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memberikan jaminan perluasan dan pemerataan akses oleh masyarakat
	Meningkat nya Kesetaraan dan Keadilan Gender	Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan-teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan perspektif keadilan dan kesetaraan gender	Pemfungsian disabilitas dan perspektif gender dalam pewujudan pelayanan kepada masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang sebelumnya, yang kemudian di *break down* ke dalam rumusan strategi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, maka disusun program dan kegiatan yang dapat mendukung dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang.

Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaan program dan kegiatan telah memenuhi target dan indikator kinerja yang telah ditentukan. Secara rinci program dan kegiatan indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang pada rentang waktu 2024-2026 adalah sebagaimana tertera pada tabel Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan sebagai berikut:

Tabel 6.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Renstra PD tahun 2024-2026 Sesuai Kepmendagri 900 Tahun 2023																				
Tuj uan PD	Indik ator Tujua n PD	Sas ara n PD	Ind ika tor Sas ara n PD	Kode				Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Sasaran Prog/Keg/Su bkeg	Indikator	Formulasi	Satua n	Target Renstra						Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026	
													2024		2025		2026			
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5				6		7		8	10	11	12	13	14	15	16	17
Ter ken dali nya laju pert uha n pen dud uk den gan men ingk atka n aks es dan kual itas pela yan an kelu arg a ber enc ana	Perse ntase Laju Pertu mbuh Pendu duk	Me nin gka tny a Pes erta KB Akti f	Per sen tas e Pes erta KB Akti f	214	02	2.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Tersedianya data kecamatan yang ter update tepat waktu	Persentase data kecamatan yang ter update tepat waktu	Jumlah Data Kecamatan yang t update tepat waktu ----- X100% Jumlah Data kecamatan yang t update	Perse n	93	547.354.900	94	79.354.900	95	79.354.900	95	79.354.900
				214	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Pendudu Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatny a Persentase Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga Terupdate	Persentase Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga Terupdate	Jumlah Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga yang sudah Terupdate -----X 100% Total Kecamatan	Perse n	71	547.354.900	86	79.354.900	100	79.354.900	100	79.354.900
				214	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Siste Informasi Keluarga	Terlaksanany Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggar an Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Doku men	21	0	0	-	0	-	0	-
				214	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yan Tersedianya	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Doku men	21	79.354.900	21	79.354.900	21	79.354.900	21	79.354.900
				214	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksanany Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Lapor an	21	266.400.000	21	-	21	-	21	-
				214	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapanga dan Pelayanan KB	Terlaksanany Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapanga dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan	Doku men	21	201.600.000	21	-	21	-	21	-

									Lapangan dan Pelayanan KB		Pelayanan KB									
	2	14	03					PROGRAM PEMBINA KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Akseptor KB Aktif	Pesentase pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Jumlah N-N-1 -----X100% Jumlah N	Perse n	2,5	3.754.768.100	2,5	501.691.960	2,5	501.691 .960	2,5	501.691.960
	2	14	03	2.01				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifa Budaya Lokal	Tersedianya akseptor KB baru	Persentase Akseptor K Baru	Jumlah akseptor K yang terlayani -----X100% JumlahPPM akseptor KB yang terlayani	Perse n	100	1.817.043.600	100	76.141.960	100	76.141.960	100	76.141.960
	2	14	03	2.01	0008			Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalia Program KKBPK	Lapor an	2	140.000.000	2	-	2	-	2	-
	2	14	03	2.01	0010			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka , dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasior dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembanguna Keluarga, Kependkuadnu, dan Keluarga Berencan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaaa Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, da Keluarga Berencana)	Lapor an	21	950.395.000	21	-	21	-	21	-
	2	14	03	2.01	0011			Pelaksanaan Mekanisn Operasional Program BangsaKencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembanguna n Keluarga, Kependuduka , dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan MekanismepOerasional Program Bangsa Kencana (Pembanguna Keluarga, Kependuduk dan Keluarga Berencan Melalui Rapat Koordina Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, da Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapa Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Lapor an	21	315.000.000	21	-	21	-	21	-

[illegible]

						2	14	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Kader IMP yang Aktif	Persentase Kader IMP yang Aktif	Jumlah Kader IMP yang Aktif ----- ----- X-100% Jumlah Kader IMP	Person	100	1.351.474.500	100	425.550.000	100	425.550.000	100	425.550.000
						2	14	0	2.0	00	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2044	942.674.500	2044	16.750.000	2044	16.750.000	2044	16.750.000
						2	14	0	2.0	00	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	408.800.000	1	408.800.000	1	408.800.000	1	408.800.000
						2	14	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Akseptor KB Aktif	Persentase Akseptor KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif ----- -----X100% Jumlah PPM Peserta KB Aktif	Person	72	1,329,629,400	72,25	1,358,895,400	72,5	1,370,855,600	72,5	1,370,855,600
						2	14	0	2.0	00	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	62,100,000	12	62,100,000	12	62,100,000	12	62,100,000

						2	14	0	2.0	00	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3.023	1,183,354,600	3.023	1,183,354,600	3.023	1,183,354,600	3.023	1,183,354,600
						2	14	0	2.0	00	Penyediaan Dukungan AyomanKomplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
						2	14	0	2.0	00	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	7	70,294,800	106	70,294,800	175	110,276,000	175	110,276,000
						2	14	0	2.0	00	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	8,880,000	12	8,880,000	12	10,125,000	12	10,125,000
						2	14	0	2.0	00	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Ser Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya pemberdayaan kampung KB yang menjadi sasaran program KKBPK	Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK	Person	100	586.250.000	100	-	100	-	100	-
						2	14	0	2.0	00	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	2	3.750.000	2	-	2	-	2	-

				2	14	0	2.0	6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas y mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Progr Bangga Kencana (Pembangunan Keluar Kependudukan, dan Keluarga Berencana) d Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kamp ung	37	582.500.000	37	-	37	-	37	-
Me nur unn ya Un me et Ne ed	Per sen tas e Un me et Ne ed		2	14	0	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DA PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTE (KS)	Menurunnya Perkawinan Pertama WanitaUsia < 20 tahun	Presentase Perkawina pertama wanita usia < 20 tahun	Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 tahun tahun ini ----- ----- X-100% Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia< 20 tahun tahun lalu	Perse n	9,64	7.259.642.800	9,54	453.737.800	9,44	453.737.800	9,44	453.737.800
			2	14	0	2.0	1		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPK, PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	Jumlah Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-IRK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif ----- ----- X-100% Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PPPKS, P-IRK dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina	Perse n	100	528.141.600	100	116.736.600	100	116.736.600	100	116.736.600

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

								(UPPKA)	Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	kegiatan	(UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan									
		2	14	04	2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Ser Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaratkaan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaa ProgrameKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	perse n	100	6.731.501.200	100		337.001.200	100	337.001.200	337.001.200
											----- X-100% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelaloan Program Ketahana dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina									
		2	14	04	2.02	003		Pelaksanaan Peningka Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarg (BKB, BKR, BKL,PPKPS PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyaraka an dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan	Jumlah Organisasi yan Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPK PIK-R dan Pemberdaya Ekonomi	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahana dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS	Organi sasi	101	337.001.200	101		337.001.200	101	337.001.200	337.001.200

										Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluarga/UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
					2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	3	0	3	-	3	-	3	-
					2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting(Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	3.045.000.000	1	-	1	-	1	-
					2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendamping	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Laporan	1	3.349.500.000	1	-	1	-	1	-
Terlaksananya Layanan Perlindungan	Persepsi Pelaksanaan Layanan Komprehensif Perlin	Meningkatnya Perempuan Korban	Persentase Perempuan Korban		2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Tersedianya perangkat daerah yang memberikan pelayanan denganSDM yang sudah mendapatkan pelatihan	Persentase PD yang melaksanakan kebijakan perlindungan tidak kekerasan pada perempuan	Jumlah PD dan lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan tidak kekerasan pada perempuan ----- X100% Jumlah PD dan	Persepsi	100	378,160,650	100	340,657,350	100	393,277,850	100	393,277,850

n Per emp uan dan Ana k	dunga n Perem puan dan Anak	ban kek era san dan TP PO yan g me nda pat kan Lay ana n ko mpr ehe nsif	Kek era san dan TP PO yan g Me nda pat kan Lay ana n Ko mpr ehe nsif																		
					2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasa Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan ----- X100% Jumlah PD yang mendapatkan advokasi	Perse n							
					2	08	03	2.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Doku men							DAK
					2	08	03	2.01	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peran gkat Daera h							
					2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kasus tindak kekerasan pada perempuan sesuai SPM	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	Jumlah laporan kasus tindak kekerasan pada perempuan ----- X100% Jumlah kasus tindak kekerasan pada	Perse n							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				2005	08073005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMP	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	20	34,732,500	20	34,732,500	20	34,732,500	20	34,732,500
				2006	08073006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMP	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50	31,516,700	50	31,516,700	50	31,516,700	50	31,516,700
Menyinkronkan Kelembagaan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan ARG	Persentase ARG	2002	080201	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan ----- X100% Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang ditetapkan	Person	75,56	733.018.950	77,22	78,88	78,88	356.939.713	356.939.713	356.939.713
				2002	080201	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah dan Kecamatan yang Melaksanakan PUG ----- X100% Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan	Person	31	107,798,250	34	107,798,250	37	112,798,250	112,798,250	112,798,250
				2001	080201	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Koordinasi Perangkat Daerah OPD dan OPD Kecamatan	Dokumen	55	60,279,000	65	60,279,000	75	65,279,000	75	65,279,000

					2	0	0	2	2	0	0	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan	Perangkat Daerah	42	36,690,400	48	36,690,400	54	40,690,400	54	40,690,400
					2	8	0	2	2	0	0	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) yang telah ditetapkan	Perangkat Daerah	50	10,828,850	50	10,828,850	70	20,828,850	70	20,828,850
					2	08	02	2	02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota	Terlaksananya lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dibangun ----- X100% Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang akan	Person	100	83,374,750	100	83,374,750	100	88,374,750	100	88,374,750

					2	08	02	2.002	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam 1. Bidang Politik 2. Bidang Hukum 3. Bidang Sosial 4. Bidang Ekonomi	Dokumen	23	83,374,750	23	83,374,750	25	88,374,750	25	88,374,750
					2	08	02	2.002	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di tingkat Kecamatan Hingga Desa	Dokumen	15	0	-	-	-	-	-	-
					2	08	02	2.003		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibangun ----- X100% Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	Person	100	541,845,950	100	339,522,250	100	356,498,363	100	356,498,363
					2	08	02	2.003	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga / Anggota Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2500	541,845,950	750	339,522,250	850	356,498,363	850	356,498,363

[illegible]

[illegible]

[illegible]

						2	14	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	128,260,000	11	96,800,000	11	96,800,000	11	96,800,000
						2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7,995,000	10	18,550,000	10	18,550,000	10	18,550,000
						2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3,720,000	12	4,704,000	12	4,704,000	12	4,704,000
						2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	98,735,500	12	98,735,500	12	98,735,500	12	98,735,500
						2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Person	0	0	100	49.078.000	100	98.156.000	100	196.312.000
											Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	196,630,250	2	49.078.000	4	98.156.000	4	196.312.000
						2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Person	100	668,114,000	100	368,480,000	100	380,720,000	100	380,720,000

					2	14	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000
					2	14	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	112,080,000	12	124,320,000	12	124,320,000
					2	14	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	254,400,000	12	254,400,000	12	254,400,000
					2	14	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Person	100	217,159,900	100	357,950,000	100	357,950,000
					2	14	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	110	154,309,900	110	210,100,000	110	210,100,000
					2	14	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	85,000,000	3	85,000,000	3	85,000,000
					2	14	0	2.0	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93	62,850,000	93	62,850,000	93	62,850,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan penjabaran perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan, baik skala nasional maupun daerah. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kesinambungan dengan dokumen daerah terkait, yaitu RPD 2024-2026. Oleh karena itu Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun sebagai pedoman melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencapai tujuan RPD Kabupaten Jombang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan target kinerja sebagai indikator pencapaian dan sasaran RPJMD 2024-2026 Kabupaten Jombang. Adapun indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator	Formulasi	Satuan	Target Renstra					
			2024		2025		2026	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
7		8	10	11	12	13	14	15
Persentase data kecamatan yang ter update waktu	Jumlah Data Kecamatan yang ter update tep waktu X 100% Jumlah Data Kecamatan yang ter update	Persen	93	547.354.900	94	79.354.900	95	79.354.900
Persentase Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga Terupdate	Jumlah Kecamatan dengan Data dan Informasi Keluarga yang sudah Terupdate X 100% Total Kecamatan	Persen	71	547.354.900	86	79.354.900	100	79.354.900
Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluar yang Dimanfaatkan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluar yang Dimanfaatkan	Dokumen	21	0	0	-	0	-
Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	JumlahData dan Informasi Keluarga yang Ter	Dokumen	21	79.354.900	21	79.354.900	21	79.354.900
Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpul Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpul Keluarga	Laporan	21	266.400.000	21	-	21	-
Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	21	201.600.000	21	-	21	-
Pesentase pertumbuhan Akseptor KB Aktif	Jumlah N-N-1 X100% Jumlah N	Persen	2,5	3.754.768.100	2,5	501.691.960	2,5	501.691.960

Persentase Akseptor KB Baru	Jumlah akseptor KB yang terlayani -----X-1-0-0% Jumlah PPM akseptor KB yang terlayani	Persen	100	1.817.043.600	100	76.141.960	100	76.141.960
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	2	140.000.000	2	-	2	-
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasi Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasi Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	21	950.395.000	21	-	21	-
Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Pro Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), R Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokak (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Pro Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), R Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokak (Minilok)	Laporan	21	315.000.000	21	-	21	-
Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	5	144.933.600	5	59.426.960	5	59.426.960
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya	Dokumen	2	16.715.000	2	16.715.000	2	16.715.000
Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ke Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ke Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	1	250.000.000	1	-	1	-

Persentase Kader IMP yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Kader IMP yang Aktif}}{\text{Jumlah Kader IMP}} \times 100\%$	Persen	100	1.351.474.500	100	425.550.000	100	425.550.000
Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2044	942.674.500	2044	16.750.000	2044	16.750.000
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	1	408.800.000	1	408.800.000	1	408.800.000
Persentase Akseptor KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PPM Peserta KB Aktif}} \times 100\%$	Persen	72	1,329,629,400	72,25	1,358,895,400	72,5	1,370,855,600
Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Terpadu Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	62,100,000	12	62,100,000	12	62,100,000
Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	3.023	1,183,354,600	3.023	1,183,354,600	3.023	1,183,354,600
Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplik Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplik Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000
Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	7	70,294,800	106	70,294,800	175	110,276,000

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	8,880,000	12	8,880,000	12	10,125,000
Persentase kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKB	Jumlah Kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan dan pengelolaan program KKB X100% Jumlah Kampung KB	Persen	100	586.250.000	100	-	100	-
Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	2	3.750.000	2	-	2	-
Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	37	582.500.000	37	-	37	-
Persentase Perkawinan pertama wanita usia tahun	Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 tahun tahun ini ----- X-1-0-0-% Jumlah Pasangan Usia Pertama Perkawinan Pertama Wanita Usia < 20 tahun tahun lalu	Persen	9,64	7.259.642.800	9,54	453.737.800	9,44	453.737.800
Persentase Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPK, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif	Jumlah Kelompok (BKB, BKR, BKL, PPPK, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang aktif ----- X-1-0-0-% Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, PPPK, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS yang dibentuk	Persen	100	528.141.600	100	116.736.600	100	116.736.600
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	4	116.736.600	4	116.736.600	4	116.736.600

Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	1	111.405.000	1	-	1	-
Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	30	300.000.000	30	-	30	-
Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat operasional kegiatan	Kelompok	1015	0	1015	-	1015	-
Persentase Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) ----- X-1-0-0-% Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina	persen	100	6.731.501.200	100	337.001.200	100	337.001.200
Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PI-KR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	101	337.001.200	101	337.001.200	101	337.001.200
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	3	0	3	-	3	-

Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Ke Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Ke Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	1	3.045.000.000	1	-	1	-
Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/CPaUloSn, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang m pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang m pendampingan	Laporan	1	3.349.5000.00	1	-	1	-
Persentase PD yang melaksanakan kebijaka perlindungan tindak kekerasan pada peremp	Jumlah PD dan lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan tinnedkaekrasan pada perempuan -----X100% Jumlah PD dan lembaga yang diadvokasi	Persen	100	378,160,650	100	340,657,350	100	393,277,850
Persentase Perangkat daerah yang aktif melaksanakan Pencegahan Kekerasan terha Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang aktif melaksanakan Penceg Kekerasan terhadap Perempuan -----X--1--0-0--% Jumlah PD yang mendapatkan advokasi	Persen	100	88,133,750	100	88,133,750	100	88,133,750
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sink Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiat Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkr Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiat Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	79,117,500	1		1	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat A dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang MeAndavopkaatsi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	53	88,133,750	53	88,133,750	53	88,133,750

Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani sesuai SPM	Jumlah laporan kasus tindak kekerasan pada perempuan $\times 100\%$ Jumlah kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani	Persen	100	239,559,600	100	239,559,600	100	292,180,100
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	42	103,979,400	42	103,979,400	45	111,406,500
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	135,580,200	6	135,580,200	8	180,773,600
Persentase SDM lembaga yang mampu menyediakan layanan perlindungan perempuan	Jumlah SDM lembaga layanan perlindungan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan $\times 100\%$ Jumlah SDM lembaga layanan yang dilatih	Persen	100%	50,467,300	100%	12,964,000	100%	12,964,000
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Pelayanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Pelayanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	55	50,467,300	55	12,964,000	55	12,964,000
Persentase Desa Layak Anak	Jumlah Desa Layak Anak yang Diberikan $\times 100\%$ Jumlah Desa Layak Anak yang ditetapkan	Persen	100	184,053,100	100	184,053,100	100	184,053,100

Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah Media dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan Dunia Usaha yang dilatih -----X-1-0-0-% Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah dan Dunia Usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	Persen	100	156,425,900	100	156,425,900	100	156,425,900
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	Organisasi	37	43,193,500	37	43,193,500	37	43,193,500
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	113,232,400	4	113,232,400	4	113,232,400
Persentase Lembaga PHA yang terlatih	Jumlah Lembaga PHA yang dilatih X1-00% Jumlah Lembaga PHA yang ditetapkan	Persen	100	27,627,200	100	27,627,200	100	27,627,200
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	27,627,200	1	27,627,200	1	27,627,200
Persentase Kasus Tindak Kekerasan Pada Anak yang terselesaikan	Jumlah kasus tindak kekerasan yang dilayani komprehensif -----X1-00% Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Jumlah kasus tindak kekerasan terhadap anak	Persen	100	476,935,250	100	420,956,050	100	434,822,314
Persentase institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak	Jumlah institusi Pendidikan yang aktif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak -----X-1-00% Jumlah institusi Pendidikan	Persen	100	63,457,700	100	38,995,200	100	38,995,200
			100	347,228,350	100	347,228,350	100	361,094,614
Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	25	115,552,200	25	115,552,200	28	129,418,464

Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPyKang mendapatkan layanan	Orang	6	231,676,150	6	231,676,150	6	231,676,150
Persentase lembaga layanan anak yang aktif	Jumlah lembaga layanan anak yang aktif X100% Jumlah lembaga layanan anak yang ditetapkan	Persen	100	66,249,200	20	34,732,500	20	34,732,500
Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga pe layanan AMPK	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga pe layanan AMPK	Kegiatan	20	34,732,500	20	34,732,500	20	34,732,500
Jumlah SDM Penyedia Layananteyralantigh dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	50	31,516,700	50	0	50	0
Persentase Pengarusutamaan Gender dan PemberdayaaPnerempuan	Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gend Pemberdayaan Perempuan -----X--1--0-0% Jumlah Kegiatan Pengarusutamaan Gend Pemberdayaan Perempuan yang ditetapka	Persen	75,56	733.018.950	77,22	339.522.250	78,88	356.939.713
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kelembagaan PUG	Jumlah Perangkat Daerah dan Kecamatan Melaksanakan PUG -----X--1--0-0% Jumlah Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan	Persen	31	107,798,250	34	107,798,250	37	112,798,250
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sink Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Ger (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Koordinasi Perangkat Daerah dan OPD Kecamatan	Dokumen	55	60,279,000	65	60,279,000	75	65,279,000
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat A Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat DaeKreachamatan	Perangkat Daerah	42	36,690,400	48	36,690,400	54	40,690,400

Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarus Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah Kecamatan yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarus Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) yang telah ditetapkan	Perangkat Daerah	50	10,828,850	50	10,828,850	70	20,828,850
Persentase lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dibangun -----X--1--0-0% Jumlah lembaga perempuan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang aktif	Persen	100	83,374,750	100	83,374,750	100	88,374,750
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam: 1. Bidang Politik 2. Bidang Hukum 3. Bidang Sosial 4. Bidang Ekonomi	Dokumen	23	83,374,750	23	83,374,750	25	88,374,750
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendukung Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendukung Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di tingkat Kecamatan dan Desa	Dokumen	15	0	-	-	-	-
Persentase SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dibangun -----X--1--0-0% Jumlah SDM lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang aktif	Persen	100	541,845,950	100	339,522,250	100	356,498,363
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah Sumber Daya Lembaga / Anggota Penerima Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	2500	541,845,950	750	339,522,250	850	356,498,363

Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang terlaksana $\times 100\%$ Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditetapkan	Persen	100	11.449.350	100	11.449.350	100	11.449.350

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan X100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditetapkan sesuai a	Persen	100	11.449.350	100	11.449.350	100	11.449.350
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	2	11.449.350	2	11.449.350	2	11.449.350
Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang terlaksana X100% Jumlah rata-rata capaian kinerja aparatur yang ditetapkan	Persen	100	5.280.000	100	5.280.000	100	5.280.000
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan X100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditetapkan sesuai a	Persen	100	5.280.000	100	5.280.000	100	5.280.000
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5.280.000	5	5.280.000	5	5.280.000
Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN waktu	Jumlah laporan keuangan yang tersusun dan pencairan gaji yang dicairkan sesuai aturan X100% Jumlah laporan keuangan yang tersusun dan pencairan gaji yang dicairkan yang ditetapkan	Persen	100	4.832,506,673	100	4.832,506,673	100	4.832,506,673
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	4,665,220,673	28	4,665,220,673	28	4,665,220,673
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	4	163,596,000	4	163,596,000	4	163,596,000

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	17	3,690,000	17	3,690,000	17	3,690,000
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia X100% Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang ditetapkan	Orang	19	11,400,000	21	12,600,000	21	12,600,000
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	19	11,400,000	21	12,600,000	21	12,600,000
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan X100% Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran yang ditetapkan	Persen	100	294,597,000	100	280,247,700	100	286,393,520
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	2,058,200	4	2,264,950	4	2,491,445
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan K yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan K yang Disediakan	Paket	12	53,828,300	12	59,193,250	12	65,112,575
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	11	128,260,000	11	96,800,000	11	96,800,000
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggangan yang Disediakan	Paket	4	7,995,000	10	18,550,000	10	18,550,000
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Dokumen	12	3,720,000	12	4,704,000	12	4,704,000
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	98,735,500	12	98,735,500	12	98,735,500

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan X100% Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang ditetapkan	Persen	0	0	100	49.078.000	100	98.156.000
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	2	49.078.000	4	98.156.000
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan X100% Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan	Persen	100	668,114,000	100	368,480,000	100	380,720,000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Men	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Men	Laporan	2	2,000,000	2	2,000,000	2	2,000,000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	102,480,000	12	112,080,000	12	124,320,000
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	563,634,000	12	254,400,000	12	254,400,000
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara X100% Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan	Persen	100	217,159,900	100	253,850,000	100	357,950,000
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	110	154,309,900	110	191,000,000	110	210,100,000
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	0	3		3	85,000,000

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili	Unit	93	62,850,000	93	62,850,000	93	62,850,000
--	--	------	----	------------	----	------------	----	------------

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang selama kurun waktu lima tahun yang akan datang. Program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang disusun berdasarkan orientasi penyediaan pelayanan dasar dibidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dengan tersusunnya dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang ini, diharapkan adanya keteraturan pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat mewujudkan sinergitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang dengan pihak atau instansi terkait lainnya, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Jombang, 3 April 2023

KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN JOMBANG



dr. PUDJI UMBARAN, M.KP
Pembina Tk I
NIP. 19680410 200212 1 006